



AUDITED

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh Telepon/Fax. (0651) 21638
BANDA ACEH 23121 - Email : dpraceh@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN TA.2024

Nomor: 004/II/AKT/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (4.02.0.00.0.00.01), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA), yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Aceh (BUA).

Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen sebagai bahan rekonsiliasi, berupa :

1. Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2024 Rp0,- (*Nihil*)
2. Laporan Realisasi Belanja periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp173.854.082.084,- (setelah dikurangi pengembalian belanja)
3. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp43.807.201,-
4. Laporan Realisasi Pendapatan periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp19.620.000,00,-
5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp0,- (*Nihil*)
6. Sisa UP/GU/TU yang belum disetor s.d 31 Desember 2024 (Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPA) adalah Rp0,- (*Nihil*)
7. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp0,- (*Nihil*)
8. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp0,- (*Nihil*)
9. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp0,- (*Nihil*)

Selanjutnya Bendahara Umum Aceh menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D dan STS yang disampaikan atas nama Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Aceh.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

An. Bendahara Umum Aceh,

Plt. Kepala Bidang Akuntansi,

(Hasrina Husni, SE, M.Si., Ak)

NIP. 19810429200504 2 001

Pengguna Anggaran,

(KHEDRI, S.Ag., MA)

NIP. 19770611 200212 1 003

KATA PENGANTAR

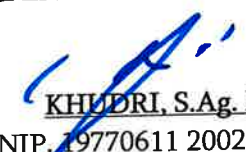
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRA menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2024 berupa Laporan Keuangan Sekretariat DPRA.

Laporan Keuangan Sekretariat DPRA terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Sekretariat DPRA Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi. Laporan Keuangan Sekretariat DPRA disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keuangan Sekretariat DPRA Tahun Anggaran 2024, dapat diketahui kinerja keuangan Sekretariat DPRA sebagai satu kesatuan dari perangkat Pemerintah Aceh baik pengelolaan pendapatan maupun serapan belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga dapat diketahui posisi dan kondisi keuangan Sekretariat DPRA yaitu operasional, aset, kewajiban dan ekuitas selama satu tahun anggaran berkenaan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sekretariat DPRA terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 26 Mei 2025
PENGUNA ANGGARAN f

KHUDRI, S.Ag. MA.
NIP. 19770611 200212 1 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vii
B. LAPORAN OPERASIONAL	viii
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
D. NERACA	x
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	9
2.1. Ekonomi Makro	9
2.2. Kebijakan Keuangan	9
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	12
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja	12
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	14
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan	15
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	18
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPA	48
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	48
5.2. Laporan Operasional	53
5.3. Laporan Perubahan Ekuitas	57
5.4. Neraca	58

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 79

BAB VII PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	12
Tabel 5.1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2024 dan TA 2023.....	48
Tabel 5.1.2 Realisasi Anggaran Belanja TA 2024 dan TA 2023.....	48
Tabel 5.1.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023.....	48
Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023	49
Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023	49
Tabel 5.1.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023.....	50
Tabel 5.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023.....	50
Tabel 5.1.2.2.2 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023.....	50
Tabel 5.1.2.2.3 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023.....	51
Tabel 5.1.2.2.4 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023.....	51
Tabel 5.1.2.2.5 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023.....	52
Tabel 5.2.1 Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO	53
Tabel 5.2.2 Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO.....	53
Tabel 5.2.2.1 Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO	53
Tabel 5.2.2.2 Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO	54
Tabel 5.2.2.3 Kenaikan/Penurunan Beban Jasa-LO	54
Tabel 5.2.2.4 Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan-LO	55
Tabel 5.2.2.5 Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas-LO	55
Tabel 5.2.2.6 Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO.....	55
Tabel 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	56
Tabel 5.4.1 Rincian Aset Lancar	57
Tabel 5.4.1.1 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan	57
Tabel 5.4.1.2 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran.....	57
Tabel 5.4.1.3.1 Rincian Asuransi Dibayar Dimuka	58
Tabel 5.4.2.1 Rincian Aset Tetap	59
Tabel 5.4.2.1.6 Rincian Akumulasi Penyusutan	73
Tabel 5.4.2.2.2 Rincian Aset Rusak Berat/Usang	74
Tabel 5.4.2.2.3 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	75
Tabel 5.4.2.2.4 Rincian Aset Ekstracomptable.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024
- 2. Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024.....
- 3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2024..
- 4. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPA Tahun Anggaran 2024.
- 5. Rekonsiliasi Kas dan Bank Per 31 Desember 2024.....
- 6. Daftar Piutang
- 7. Dana Alokasi Khusus Tahun 2024.....
- 8. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan
- 9. Daftar Rekapitulasi Jasa Konsultasi dan Kontrak Pekerjaan
- 10. Daftar Persediaan
- 11. Daftar Persediaan Barang Modal yang Belum Diserahkan ke Kabupaten/Kota.....
- 12. Daftar Persediaan Barang yang Sudah Diserahkan Tahun 2024
- 13. Rekapitulasi Barang.....
- 14. Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024.....
- 15. Daftar Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan
- 16. Laporan Kegiatan Debt Swap RDI-352/1999 yang Dialokasikan Melalui APBA 2024.....

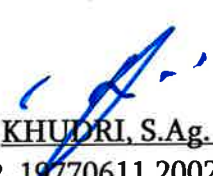
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 26 Mei 2025

 PENGGUNA ANGGARAN 


KHUDRI, S.Ag. MA.

NIP. 19770611 200212 1 003



PEMERINTAH ACEH
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DPRA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	19,620,000.00	19,620,000.00	100,00	19,620,000.00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19,620,000.00	19,620,000.00	100,00	19,620,000.00
4.1.02.	Retribusi Daerah	19,620,000.00	19,620,000.00	100,00	19,620,000.00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	19,620,000.00	19,620,000.00	100,00	19,620,000.00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	19,620,000.00	19,620,000.00	100,00	19,620,000.00
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	19,620,000.00	19,620,000.00	100,00	19,620,000.00
5.	BELANJA DAERAH	178,677,582,483.00	173,854,082,084.00	97,30	192,265,395,834.00
5.1.	BELANJA OPERASI	176,619,612,089.00	171,799,218,130.00	97,27	187,676,058,028.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	70,581,250,386.00	69,963,521,484.00	99,12	66,580,979,138.00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9,423,529,764.00	9,423,529,764.00	100,00	8,813,821,221.00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	7,187,645,740.00	7,187,645,740.00	100,00	6,686,800,900.00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	7,072,980,340.00	7,072,980,340.00	100,00	6,686,800,900.00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	114,665,400.00	114,665,400.00	100,00	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	698,775,030.00	698,775,030.00	100,00	638,147,756.00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	690,531,228.00	690,531,228.00	100,00	638,147,756.00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8,243,802.00	8,243,802.00	100,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185,860,000.00	185,860,000.00	100,00	206,780,000.00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185,860,000.00	185,860,000.00	100,00	206,780,000.00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39,893,000.00	39,893,000.00	100,00	42,378,000.00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33,278,000.00	33,278,000.00	100,00	42,378,000.00
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,615,000.00	6,615,000.00	100,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	287,700,000.00	287,700,000.00	100,00	292,300,000.00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	287,700,000.00	287,700,000.00	100,00	292,300,000.00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	404,320,860.00	404,320,860.00	100,00	404,320,860.00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	397,803,060.00	397,803,060.00	100,00	404,320,860.00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,517,800.00	6,517,800.00	100,00	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,612,876.00	8,612,876.00	100,00	15,947,609.00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,612,876.00	8,612,876.00	100,00	15,947,609.00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	87,264.00	87,264.00	100,00	89,868.00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84,826.00	84,826.00	100,00	89,868.00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,438.00	2,438.00	100,00	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	551,269,095.00	551,269,095.00	100,00	472,085,948.00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	546,663,791.00	546,663,791.00	100,00	472,085,948.00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4,605,304.00	4,605,304.00	100,00	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14,841,406.00	14,841,406.00	100,00	13,742,534.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14,596,782.00	14,596,782.00	100,00	13,742,534.00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	244,624.00	244,624.00	100,00	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	44,524,493.00	44,524,493.00	100,00	41,227,746.00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	43,790,629.00	43,790,629.00	100,00	41,227,746.00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	733,864.00	733,864.00	100,00	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9,495,902,338.00	9,495,902,338.00	100,00	7,714,875,282.00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	905,882,663.00	905,882,663.00	100,00	212,692,000.00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	905,882,663.00	905,882,663.00	100,00	212,692,000.00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	919,660,000.00	919,660,000.00	100,00	1,628,536,600.00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	400,260,000.00	400,260,000.00	100,00	1,628,536,600.00
5.1.01.02.03.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	519,400,000.00	519,400,000.00	100,00	-
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7,670,359,675.00	7,670,359,675.00	100,00	5,873,646,682.00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7,670,359,675.00	7,670,359,675.00	100,00	5,873,646,682.00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	894,506,000.00	894,506,000.00	100,00	879,219,000.00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	767,306,000.00	767,306,000.00	100,00	765,819,000.00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	759,146,000.00	759,146,000.00	100,00	757,659,000.00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000.00	8,160,000.00	100,00	8,160,000.00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	127,200,000.00	127,200,000.00	100,00	113,400,000.00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	127,200,000.00	127,200,000.00	100,00	113,400,000.00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	50,407,312,284.00	49,839,683,382.00	98,87	48,807,063,635.00
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	2,537,025,000.00	2,537,025,000.00	100,00	2,554,800,000.00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	2,537,025,000.00	2,537,025,000.00	100,00	2,554,800,000.00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	324,354,000.00	324,354,000.00	100,00	327,180,975.00
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	324,354,000.00	324,354,000.00	100,00	327,180,975.00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	241,231,020.00	241,231,020.00	100,00	245,315,504.00
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	241,231,020.00	241,231,020.00	100,00	245,315,504.00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	219,915,000.00	219,915,000.00	100,00	219,240,000.00
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	219,915,000.00	219,915,000.00	100,00	219,240,000.00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3,676,185,000.00	3,676,185,000.00	100,00	3,704,460,000.00
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3,676,185,000.00	3,676,185,000.00	100,00	3,704,460,000.00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	266,720,250.00	266,720,250.00	100,00	318,876,750.00
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	266,720,250.00	266,720,250.00	100,00	318,876,750.00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43,238,280.00	5,350,500.00	12,37	-
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43,238,280.00	5,350,500.00	12,37	-
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	14,340,000,000.00	14,340,000,000.00	100,00	14,520,000,000.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	14,340,000,000.00	14,340,000,000.00	100,00	14,520,000,000.00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,355,000,000.00	2,355,000,000.00	100,00	3,615,000,000.00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,355,000,000.00	2,355,000,000.00	100,00	3,615,000,000.00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	47,484,137.00	47,484,137.00	100,00	48,167,566.00
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	47,484,137.00	47,484,137.00	100,00	48,167,566.00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2,394,142,722.00	1,864,401,600.00	77,87	247,272,840.00
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	223,584,960.00	223,584,960.00	100,00	226,225,800.00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5,204,160.00	5,204,160.00	100,00	5,261,760.00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	15,612,480.00	15,612,480.00	100,00	15,785,280.00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2,149,741,122.00	1,620,000,000.00	75,36	-
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	22,900,000,000.00	22,900,000,000.00	100,00	23,000,000,000.00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	22,900,000,000.00	22,900,000,000.00	100,00	23,000,000,000.00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1,062,016,875.00	1,062,016,875.00	100,00	6,750,000.00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1,062,016,875.00	1,062,016,875.00	100,00	6,750,000.00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360,000,000.00	309,900,000.00	86,08	366,000,000.00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360,000,000.00	309,900,000.00	86,08	366,000,000.00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360,000,000.00	309,900,000.00	86,08	366,000,000.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106,038,361,703.00	101,835,696,646.00	96,04	121,095,078,890.00
5.1.02.01.	Belanja Barang	23,714,144,313.00	23,247,299,510.00	98,03	29,515,520,026.00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	23,714,144,313.00	23,247,299,510.00	98,03	29,515,520,026.00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	5,434,560.00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100,947,000.00	100,935,000.00	99,99	196,011,000.00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	81,149,325.00	81,149,325.00	100,00	79,154,739.00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	1,740,000.00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	437,947,449.00	433,869,950.00	99,07	625,636,800.00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	52,104,450.00	51,962,700.00	99,73	55,121,300.00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,488,095,241.00	1,416,248,720.00	95,17	1,458,566,082.00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40,000,000.00	40,000,000.00	100,00	40,000,000.00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	183,600,370.00	182,584,000.00	99,45	181,406,500.00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	25,000,000.00	24,610,920.00	98,44	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	312,064,400.00	307,968,150.00	98,69	259,156,035.00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	197,870,000.00	185,064,750.00	93,53	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1,146,186,000.00	1,048,686,000.00	91,49	119,200,000.00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	282,490,683.00	279,022,575.00	98,77	330,757,010.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6,364,200.00	6,268,170.00	98,49	-
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2,309,650,000.00	2,309,408,500.00	99,99	2,627,391,000.00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,628,782,676.00	14,400,554,000.00	98,44	21,298,333,000.00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	700,000,000.00	687,733,000.00	98,25	596,573,000.00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	318,987,519.00	289,177,000.00	90,65	249,779,000.00
5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1,337,205,000.00	1,337,205,000.00	100,00	1,391,260,000.00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13,200,000.00	12,870,450.00	97,50	-
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	52,500,000.00	51,981,300.00	99,01	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	27,796,726,897.00	26,968,765,413.00	97,02	30,670,162,470.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	25,389,666,752.00	24,659,884,184.00	97,13	27,641,113,042.00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	83,160,000.00	75,060,000.00	90,26	63,900,000.00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	648,800,000.00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	42,800,000.00	26,800,000.00	62,62	52,400,000.00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	36,200,000.00	36,200,000.00	100,00	199,575,000.00
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	-	-	-	13,500,000.00
5.1.02.02.01.0010.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10,000,000.00	10,000,000.00	100,00	30,000,000.00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-	22,400,000.00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	4,200,000.00	4,200,000.00	100,00	6,000,000.00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7,717,320,000.00	7,522,520,000.00	97,48	6,966,800,000.00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8,600,000.00	7,500,000.00	87,21	1,188,650,000.00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,823,700,000.00	2,712,000,000.00	96,04	4,093,500,000.00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	871,408,000.00	869,908,000.00	99,83	885,600,000.00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1,949,100,000.00	1,935,600,000.00	99,31	1,895,512,903.00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	423,600,000.00	393,600,000.00	92,92	431,100,000.00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	-	-	-	127,396,590.00
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	73,756,465.00	-	-	-
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	45,250,000.00	45,250,000.00	100,00	100,000,000.00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	137,570,000.00	85,298,993.00	62,00	106,593,480.00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	-	-	-	18,000,000.00
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	269,320,000.00	260,820,000.00	96,84	285,320,000.00
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	48,995,754.00	48,995,754.00	100,00	216,995,150.00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3,124,097,100.00	3,111,280,410.00	99,59	3,283,984,400.00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	6,484,920.00	3,005,174.00	46,34	38,924,697.00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	830,000,000.00	811,285,710.00	97,75	831,750,500.00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	3,737,266,659.00	3,737,266,659.00	100,00	3,752,746,206.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	280,884,000.00	280,884,000.00	100,00	283,813,000.00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	888,068,000.00	819,276,130.00	92,25	786,637,832.00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	6,958,000.00	6,958,000.00	100,00	13,021,000.00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	508,216,000.00	483,216,000.00	95,08	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	333,221,054.00	270,873,254.00	81,29	160,926,284.00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	936,168,000.00	909,576,100.00	97,16	687,137,000.00
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	193,322,800.00	192,510,000.00	99,58	450,129,000.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	673,697,225.00	650,763,974.00	96,60	636,177,017.00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	22,249,489.00	22,249,488.00	100,00	22,723,999.00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	27,811,886.00	27,811,886.00	100,00	28,615,751.00
5.1.02.02.02.0008.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	623,635,850.00	600,702,600.00	96,32	584,837,267.00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	219,957,220.00	186,803,940.00	84,93	68,806,200.00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4,057,220.00	-	-	29,992,200.00
5.1.02.02.04.0084.	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	42,000,000.00	42,000,000.00	100,00	13,950,000.00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	2,664,000.00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	22,200,000.00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	46,200,000.00	25,840,800.00	55,93	-
5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric	90,200,000.00	89,059,740.00	98,74	-
5.1.02.02.04.0425.	Belanja Sewa Peralatan Bantu	37,500,000.00	29,903,400.00	79,74	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,478,000,000.00	1,452,057,220.00	98,24	2,003,400,000.00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,272,000,000.00	1,272,000,000.00	100,00	1,947,550,000.00
5.1.02.02.05.0025.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	149,000,000.00	123,101,220.00	82,62	-
5.1.02.02.05.0032.	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	57,000,000.00	56,956,000.00	99,92	32,850,000.00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	-	-	-	23,000,000.00
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8,000,000.00	491,989.00	6,15	489,961.00
5.1.02.02.06.0124.	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	8,000,000.00	491,989.00	6,15	489,961.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	302,000,000.00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	268,500,000.00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	33,500,000.00
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	27,405,700.00	18,764,106.00	68,47	18,176,250.00
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	27,405,700.00	18,764,106.00	68,47	18,176,250.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4,569,150,977.00	4,542,306,912.00	99,41	5,971,312,977.00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,281,053,396.00	3,254,474,931.00	99,19	3,278,818,942.00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	82,796,000.00	82,791,470.00	99,99	80,139,000.00
5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	110,000,000.00	109,956,600.00	99,96	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,865,012,406.00	1,864,593,451.00	99,98	1,855,561,712.00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37,110,000.00	37,085,000.00	99,93	36,822,000.00
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	19,758,000.00	19,758,000.00	100,00	7,000,000.00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80,300,000.00	79,867,200.00	99,46	314,275,565.00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	111,038,850.00	111,038,850.00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	635,872,640.00	625,108,710.00	98,31	532,458,120.00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	68,165,100.00
5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	138,780,500.00	136,280,500.00	98,20	-
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	98,000,000.00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-	22,770,000.00
5.1.02.03.02.0204.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	14,985,000.00	14,985,000.00	100,00	-
5.1.02.03.02.0205.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	-	-	14,209,954.00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-	-	69,985,500.00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	175,400,000.00	163,042,350.00	92,95	143,711,700.00
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10,000,000.00	9,967,800.00	99,68	-
5.1.02.03.02.0433.	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	-	-	-	35,720,291.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	963,667,581.00	963,667,581.00	100,00	2,341,326,110.00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	963,667,581.00	963,667,581.00	100,00	2,262,349,822.00
5.1.02.03.03.0030.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	49,434,405.00
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-	-	29,541,883.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	324,430,000.00	324,164,400.00	99,92	351,167,925.00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	324,430,000.00	324,164,400.00	99,92	351,167,925.00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	49,958,339,516.00	47,077,324,811.00	94,23	54,938,083,417.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49,958,339,516.00	47,077,324,811.00	94,23	51,719,189,804.00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49,494,098,890.00	46,632,119,811.00	94,22	51,563,594,804.00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,025,000.00	9,025,000.00	47,44	152,110,000.00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,580,000.00	5,580,000.00	100,00	3,485,000.00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	439,635,626.00	430,600,000.00	97,94	-
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	3,218,893,613.00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	-	-	-	3,218,893,613.00
5.2.	BELANJA MODAL	2,057,970,394.00	2,054,863,954.00	99,85	4,589,337,806.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,513,595,600.00	1,513,395,600.00	99,99	2,492,321,457.00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	40,740,000.00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	40,740,000.00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	-	-	-	40,740,000.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	569,845,600.00	569,645,600.00	99,96	1,723,751,457.00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	141,827,152.00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	73,004,460.00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	68,822,692.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	526,500,100.00	526,300,100.00	99,96	1,538,085,965.00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	88,034,100.00	88,034,100.00	100,00	152,600,000.00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	167,496,000.00	167,296,000.00	99,88	292,200,000.00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	22,370,000.00	22,370,000.00	100,00	59,740,200.00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	248,600,000.00	248,600,000.00	100,00	1,033,545,765.00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43,345,500.00	43,345,500.00	100,00	43,838,340.00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	33,466,500.00	33,466,500.00	100,00	43,838,340.00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9,879,000.00	9,879,000.00	100,00	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	71,800,000.00	71,800,000.00	100,00	517,950,000.00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	71,800,000.00	71,800,000.00	100,00	517,950,000.00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	61,950,000.00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	71,800,000.00	71,800,000.00	100,00	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	456,000,000.00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	1,019,000.00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	-	1,019,000.00
5.2.02.07.01.0008.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	-	-	-	1,019,000.00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	871,950,000.00	871,950,000.00	100,00	208,861,000.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	573,530,000.00	573,530,000.00	100,00	178,800,000.00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	452,350,000.00	452,350,000.00	100,00	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	99,480,000.00	99,480,000.00	100,00	107,800,000.00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	21,700,000.00	21,700,000.00	100,00	71,000,000.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	298,420,000.00	298,420,000.00	100,00	30,061,000.00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	298,420,000.00	298,420,000.00	100,00	30,061,000.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	544,374,794.00	541,468,354.00	99,47	2,097,016,349.00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	544,374,794.00	541,468,354.00	99,47	2,097,016,349.00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	544,374,794.00	541,468,354.00	99,47	2,097,016,349.00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	544,374,794.00	541,468,354.00	99,47	2,097,016,349.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(178,657,962,483.00)	(173,834,462,084.00)	97,30	(192,245,775,834.00)

Banda Aceh, 26 Mei 2025

 **Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh** 


Khudri, S.Ag., MA
NIP. 19770611 200212 1 003

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DPRA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	0.00	0.00	Rp0	0,00
PENDAPATAN DAERAH-LO	0.00	0.00	Rp0	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	19,629,510.44	19,610,489.56	Rp19.021	0,10
Retribusi Daerah-LO	19,629,510.44	19,610,489.56	Rp19.021	0,10
Retribusi Jasa Usaha-LO	19,629,510.44	19,610,489.56	Rp19.021	0,10
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	19,629,510.44	19,610,489.56	Rp19.021	0,10
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	19,629,510.44	19,610,489.56	Rp19.021	0,10
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	19,629,510.44	19,610,489.56	Rp19.021	0,10
JUMLAH PENDAPATAN-LO	19,629,510.44	19,610,489.56	Rp19.021	0,10
BEBAN DAERAH	0.00	0.00	Rp0	0,00
BEBAN OPERASI	182,740,647,751.49	200,450,527,038.37	-Rp17.709.879.287	-8,84
Beban Pegawai	69,963,521,484.00	66,574,979,138.00	Rp3.388.542.346	5,09
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9,423,529,764.00	8,813,821,221.00	Rp609.708.543	6,92
Beban Gaji Pokok ASN	7,187,645,740.00	6,686,800,900.00	Rp500.844.840	7,49
Beban Gaji Pokok PNS	7,072,980,340.00	6,686,800,900.00	Rp386.179.440	5,78
Beban Gaji Pokok PPPK	114,665,400.00	0.00	Rp114.665.400	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	698,775,030.00	638,147,756.00	Rp60.627.274	9,50
Beban Tunjangan Keluarga PNS	690,531,228.00	638,147,756.00	Rp52.383.472	8,21
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8,243,802.00	0.00	Rp8.243.802	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	185,860,000.00	206,780,000.00	-Rp20.920.000	-10,12
Beban Tunjangan Jabatan PNS	185,860,000.00	206,780,000.00	-Rp20.920.000	-10,12
Beban Tunjangan Fungsional ASN	39,893,000.00	42,378,000.00	-Rp2.485.000	-5,86
Beban Tunjangan Fungsional PNS	33,278,000.00	42,378,000.00	-Rp9.100.000	-21,47
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6,615,000.00	0.00	Rp6.615.000	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	287,700,000.00	292,300,000.00	-Rp4.600.000	-1,57
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	287,700,000.00	292,300,000.00	-Rp4.600.000	-1,57
Beban Tunjangan Beras ASN	404,320,860.00	404,320,860.00	Rp0	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	397,803,060.00	404,320,860.00	-Rp6.517.800	-1,61
Beban Tunjangan Beras PPPK	6,517,800.00	0.00	Rp6.517.800	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,612,876.00	15,947,609.00	-Rp7.334.733	-45,99
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,612,876.00	15,947,609.00	-Rp7.334.733	-45,99
Beban Pembulatan Gaji ASN	87,264.00	89,868.00	-Rp2.604	-2,90
Beban Pembulatan Gaji PNS	84,826.00	89,868.00	-Rp5.042	-5,61
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,438.00	0.00	Rp2.438	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	551,269,095.00	472,085,948.00	Rp79.183.147	16,77
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	546,663,791.00	472,085,948.00	Rp74.577.843	15,80

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4,605,304.00	0.00	Rp4.605.304	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14,841,406.00	13,742,534.00	Rp1.098.872	8,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14,596,782.00	13,742,534.00	Rp854.248	6,22
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	244,624.00	0.00	Rp244.624	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	44,524,493.00	41,227,746.00	Rp3.296.747	8,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	43,790,629.00	41,227,746.00	Rp2.562.883	6,22
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	733,864.00	0.00	Rp733.864	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	9,495,902,338.00	7,714,875,282.00	Rp1.781.027.056	23,09
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	905,882,663.00	212,692,000.00	Rp693.190.663	325,91
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	905,882,663.00	212,692,000.00	Rp693.190.663	325,91
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	919,660,000.00	1,628,536,600.00	-Rp708.876.600	-43,53
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	400,260,000.00	1,628,536,600.00	-Rp1.228.276.600	-75,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	519,400,000.00	0.00	Rp519.400.000	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7,670,359,675.00	5,873,646,682.00	Rp1.796.712.993	30,59
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7,670,359,675.00	5,873,646,682.00	Rp1.796.712.993	30,59
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	894,506,000.00	879,219,000.00	Rp15.287.000	1,74
Beban Honorarium	767,306,000.00	765,819,000.00	Rp1.487.000	0,19
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	759,146,000.00	757,659,000.00	Rp1.487.000	0,20
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000.00	8,160,000.00	Rp0	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	127,200,000.00	113,400,000.00	Rp13.800.000	12,17
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	127,200,000.00	113,400,000.00	Rp13.800.000	12,17
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	49,839,683,382.00	48,807,063,635.00	Rp1.032.619.747	2,12
Beban Uang Representasi DPRD	2,537,025,000.00	2,554,800,000.00	-Rp17.775.000	-0,70
Beban Uang Representasi DPRD	2,537,025,000.00	2,554,800,000.00	-Rp17.775.000	-0,70
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	324,354,000.00	327,180,975.00	-Rp2.826.975	-0,86
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	324,354,000.00	327,180,975.00	-Rp2.826.975	-0,86
Beban Tunjangan Beras DPRD	241,231,020.00	245,315,504.00	-Rp4.084.484	-1,66
Beban Tunjangan Beras DPRD	241,231,020.00	245,315,504.00	-Rp4.084.484	-1,66
Beban Uang Paket DPRD	219,915,000.00	219,240,000.00	Rp675.000	0,31
Beban Uang Paket DPRD	219,915,000.00	219,240,000.00	Rp675.000	0,31
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	3,676,185,000.00	3,704,460,000.00	-Rp28.275.000	-0,76
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	3,676,185,000.00	3,704,460,000.00	-Rp28.275.000	-0,76
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	266,720,250.00	318,876,750.00	-Rp52.156.500	-16,36
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	266,720,250.00	318,876,750.00	-Rp52.156.500	-16,36

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5,350,500.00	0.00	Rp5.350.500	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5,350,500.00	0.00	Rp5.350.500	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	14,340,000,000.00	14,520,000,000.00	-Rp180.000.000	-1,24
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	14,340,000,000.00	14,520,000,000.00	-Rp180.000.000	-1,24
Beban Tunjangan Reses DPRD	2,355,000,000.00	3,615,000,000.00	-Rp1.260.000.000	-34,85
Beban Tunjangan Reses DPRD	2,355,000,000.00	3,615,000,000.00	-Rp1.260.000.000	-34,85
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	47,484,137.00	48,167,566.00	-Rp683.429	-1,42
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	47,484,137.00	48,167,566.00	-Rp683.429	-1,42
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1,864,401,600.00	247,272,840.00	Rp1.617.128.760	653,99
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	223,584,960.00	226,225,800.00	-Rp2.640.840	-1,17
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5,204,160.00	5,261,760.00	-Rp57.600	-1,09
Beban Jaminan Kematian DPRD	15,612,480.00	15,785,280.00	-Rp172.800	-1,09
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	1,620,000,000.00	0.00	Rp1.620.000.000	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	22,900,000,000.00	23,000,000,000.00	-Rp100.000.000	-0,43
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	22,900,000,000.00	23,000,000,000.00	-Rp100.000.000	-0,43
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	1,062,016,875.00	6,750,000.00	Rp1.055.266.875	15.633,58
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	1,062,016,875.00	6,750,000.00	Rp1.055.266.875	15.633,58
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	309,900,000.00	360,000,000.00	-Rp50.100.000	-13,92
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	309,900,000.00	360,000,000.00	-Rp50.100.000	-13,92
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	309,900,000.00	360,000,000.00	-Rp50.100.000	-13,92
Beban Barang dan Jasa	101,650,376,539.95	121,255,804,724.20	-Rp19.605.428.184	-16,17
Beban Barang	23,284,454,574.00	29,613,738,042.00	-Rp6.329.283.468	-21,37
Beban Barang Pakai Habis	23,284,454,574.00	29,613,738,042.00	-Rp6.329.283.468	-21,37
Beban Bahan-Bahan Kimia	0.00	5,434,560.00	-Rp5.434.560	-100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100,935,000.00	196,011,000.00	-Rp95.076.000	-48,51
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	79,154,739.00	80,474,563.00	-Rp1.319.824	-1,64
Beban Bahan-Bahan Lainnya	870,000.00	870,000.00	Rp0	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	332,000.00	1,079,000.00	-Rp747.000	-69,23
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	408,346,050.00	616,521,300.00	-Rp208.175.250	-33,77
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	51,962,700.00	55,121,300.00	-Rp3.158.600	-5,73
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,479,636,720.00	1,432,109,582.00	Rp47.527.138	3,32
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	40,000,000.00	40,000,000.00	Rp0	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	182,584,000.00	181,406,500.00	Rp1.177.500	0,65
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	24,610,920.00	0.00	Rp24.610.920	0,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	306,815,650.00	325,150,235.00	-Rp18.334.585	-5,64
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	185,064,750.00	0.00	Rp185.064.750	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,048,686,000.00	119,200,000.00	Rp929.486.000	779,77
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	280,258,625.00	391,469,002.00	-Rp111.210.377	-28,41
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6,268,170.00	5,555,000.00	Rp713.170	12,84
Beban Natura dan Pakan-Natura	2,309,408,500.00	2,627,391,000.00	-Rp317.982.500	-12,10
Beban Makanan dan Minuman Rapat	14,400,554,000.00	21,298,333,000.00	-Rp6.897.779.000	-32,39
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	687,733,000.00	596,573,000.00	Rp91.160.000	15,28
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	289,177,000.00	249,779,000.00	Rp39.398.000	15,77
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1,337,205,000.00	1,391,260,000.00	-Rp54.055.000	-3,89
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12,870,450.00	0.00	Rp12.870.450	0,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	51,981,300.00	0.00	Rp51.981.300	0,00
Beban Jasa	26,746,290,242.95	30,732,670,288.20	-Rp3.986.380.045	-12,97
Beban Jasa Kantor	24,543,518,769.00	27,662,670,302.00	-Rp3.119.151.533	-11,28
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75,060,000.00	63,900,000.00	Rp11.160.000	17,46
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0.00	648,800,000.00	-Rp648.800.000	-100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	26,800,000.00	52,400,000.00	-Rp25.600.000	-48,85
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	36,200,000.00	199,575,000.00	-Rp163.375.000	-81,86
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	0.00	13,500,000.00	-Rp13.500.000	-100,00
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10,000,000.00	30,000,000.00	-Rp20.000.000	-66,67
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0.00	22,400,000.00	-Rp22.400.000	-100,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	4,200,000.00	6,000,000.00	-Rp1.800.000	-30,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	7,522,520,000.00	6,966,800,000.00	Rp555.720.000	7,98
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7,500,000.00	1,188,650,000.00	-Rp1.181.150.000	-99,37
Beban Jasa Tenaga Ahli	2,712,000,000.00	4,093,500,000.00	-Rp1.381.500.000	-33,75
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	869,908,000.00	885,600,000.00	-Rp15.692.000	-1,77
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1,935,600,000.00	1,895,512,903.00	Rp40.087.097	2,11
Beban Jasa Tenaga Supir	393,600,000.00	431,100,000.00	-Rp37.500.000	-8,70
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0.00	127,396,590.00	-Rp127.396.590	-100,00
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	45,250,000.00	100,000,000.00	-Rp54.750.000	-54,75
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	85,298,993.00	106,593,480.00	-Rp21.294.487	-19,98

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Kalibrasi	0.00	18,000,000.00	-Rp18.000.000	-100,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	260,820,000.00	285,320,000.00	-Rp24.500.000	-8,59
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	48,995,754.00	216,995,150.00	-Rp167.999.396	-77,42
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3,111,280,410.00	3,283,984,400.00	-Rp172.703.990	-5,26
Beban Tagihan Telepon	3,021,539.00	36,428,599.00	-Rp33.407.060	-91,71
Beban Tagihan Air	811,315,530.00	819,724,090.00	-Rp8.408.560	-1,03
Beban Tagihan Listrik	3,620,855,059.00	3,788,825,974.00	-Rp167.970.915	-4,43
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	280,884,000.00	283,813,000.00	-Rp2.929.000	-1,03
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	819,276,130.00	786,637,832.00	Rp32.638.298	4,15
Beban Paket/Pengiriman	6,958,000.00	13,021,000.00	-Rp6.063.000	-46,56
Beban Registrasi/Keanggotaan	483,216,000.00	0.00	Rp483.216.000	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	270,873,254.00	160,926,284.00	Rp109.946.970	68,32
Beban Lembur	909,576,100.00	687,137,000.00	Rp222.439.100	32,37
Beban Medical Check Up	192,510,000.00	450,129,000.00	-Rp257.619.000	-57,23
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	544,654,218.95	677,127,575.20	-Rp132.473.356	-19,56
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	22,249,488.00	22,723,999.00	-Rp474.511	-2,09
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	27,811,886.00	28,615,751.00	-Rp803.865	-2,81
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	494,592,844.95	625,787,825.20	-Rp131.194.980	-20,96
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	186,803,940.00	68,806,200.00	Rp117.997.740	171,49
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0.00	29,992,200.00	-Rp29.992.200	-100,00
Beban Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	42,000,000.00	13,950,000.00	Rp28.050.000	201,08
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0.00	2,664,000.00	-Rp2.664.000	-100,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	22,200,000.00	-Rp22.200.000	-100,00
Beban Sewa Peralatan Umum	25,840,800.00	0.00	Rp25.840.800	0,00
Beban Sewa Elektronik/Electric	89,059,740.00	0.00	Rp89.059.740	0,00
Beban Sewa Peralatan Bantu	29,903,400.00	0.00	Rp29.903.400	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1,452,057,220.00	2,003,400,000.00	-Rp551.342.780	-27,52
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,272,000,000.00	1,947,550,000.00	-Rp675.550.000	-34,69
Beban Sewa Bangunan Terbuka	123,101,220.00	0.00	Rp123.101.220	0,00
Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	56,956,000.00	32,850,000.00	Rp24.106.000	73,38
Beban Sewa Hotel	0.00	23,000,000.00	-Rp23.000.000	-100,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	491,989.00	489,961.00	Rp2.028	0,41
Beban Sewa Jaringan Transmisi	491,989.00	489,961.00	Rp2.028	0,41
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	18,764,106.00	18,176,250.00	Rp587.856	3,23
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	18,764,106.00	18,176,250.00	Rp587.856	3,23
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0.00	302,000,000.00	-Rp302.000.000	-100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0.00	268,500,000.00	-Rp268.500.000	-100,00
Beban Bimbingan Teknis	0.00	33,500,000.00	-Rp33.500.000	-100,00
Beban Pemeliharaan	4,542,306,912.00	5,971,312,977.00	-Rp1.429.006.065	-23,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,254,474,931.00	3,278,818,942.00	-Rp24.344.011	-0,74
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	82,791,470.00	80,139,000.00	Rp2.652.470	3,31
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	109,956,600.00	0.00	Rp109.956.600	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,864,593,451.00	1,855,561,712.00	Rp9.031.739	0,49
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37,085,000.00	36,822,000.00	Rp263.000	0,71
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	19,758,000.00	7,000,000.00	Rp12.758.000	182,26
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	79,867,200.00	314,275,565.00	-Rp234.408.365	-74,59
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	111,038,850.00	0.00	Rp111.038.850	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	625,108,710.00	532,458,120.00	Rp92.650.590	17,40
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	68,165,100.00	-Rp68.165.100	-100,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	136,280,500.00	0.00	Rp136.280.500	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0.00	98,000,000.00	-Rp98.000.000	-100,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0.00	22,770,000.00	-Rp22.770.000	-100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	14,985,000.00	0.00	Rp14.985.000	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0.00	14,209,954.00	-Rp14.209.954	-100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0.00	69,985,500.00	-Rp69.985.500	-100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	163,042,350.00	143,711,700.00	Rp19.330.650	13,45

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9,967,800.00	0.00	Rp9.967.800	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	0.00	35,720,291.00	-Rp35.720.291	-100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	963,667,581.00	2,341,326,110.00	-Rp1.377.658.529	-58,84
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	963,667,581.00	2,262,349,822.00	-Rp1.298.682.241	-57,40
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	49,434,405.00	-Rp49.434.405	-100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0.00	29,541,883.00	-Rp29.541.883	-100,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	324,164,400.00	351,167,925.00	-Rp27.003.525	-7,69
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	324,164,400.00	351,167,925.00	-Rp27.003.525	-7,69
Beban Perjalanan Dinas	47,077,324,811.00	54,938,083,417.00	-Rp7.860.758.606	-14,31
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47,077,324,811.00	51,719,189,804.00	-Rp4.641.864.993	-8,98
Beban Perjalanan Dinas Biasa	46,632,119,811.00	51,563,594,804.00	-Rp4.931.474.993	-9,56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,025,000.00	152,110,000.00	-Rp143.085.000	-94,07
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,580,000.00	3,485,000.00	Rp2.095.000	60,11
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	430,600,000.00	0.00	Rp430.600.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0.00	3,218,893,613.00	-Rp3.218.893.613	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0.00	3,218,893,613.00	-Rp3.218.893.613	-100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	11,126,749,727.54	12,619,743,176.17	-Rp1.492.993.449	-11,83
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,530,905,025.64	8,737,106,169.69	-Rp1.206.201.144	-13,81
Beban Penyusutan Alat Besar	23,710,892.85	77,365,750.00	-Rp53.654.857	-69,35
Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	3,614,285.71	32,033,571.43	-Rp28.419.286	-88,72
Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	20,096,607.14	45,332,178.57	-Rp25.235.571	-55,67
Beban Penyusutan Alat Angkutan	1,982,570,696.00	1,982,570,696.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1,843,337,200.00	1,843,337,200.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	95,860,000.00	95,860,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7,773,496.00	7,773,496.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	35,600,000.00	35,600,000.00	Rp0	0,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	4,399,780.00	9,139,780.00	-Rp4.740.000	-51,86
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	1,011,780.00	5,751,780.00	-Rp4.740.000	-82,41
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	528,000.00	528,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	2,860,000.00	2,860,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,015,113,564.20	4,807,060,201.88	-Rp791.946.638	-16,47
Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	1,500,000.00	1,500,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	72,445,200.00	72,445,200.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	546,852,176.80	546,852,176.80	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	247,840,388.00	340,728,188.00	-Rp92.887.800	-27,26
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	804,998,005.00	1,102,400,783.20	-Rp297.402.778	-26,98
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	9,360,000.00	9,360,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	86,881,141.20	87,257,341.20	-Rp376.200	-0,43
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	617,974,428.00	692,623,228.00	-Rp74.648.800	-10,78
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	145,861,564.00	147,761,564.00	-Rp1.900.000	-1,29
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,244,736,899.00	1,511,397,858.40	-Rp266.660.959	-17,64
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	29,456,240.00	29,456,240.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	13,004,722.20	6,311,422.20	Rp6.693.300	106,05
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	5,977,000.00	5,977,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1,975,800.00	0.00	Rp1.975.800	0,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	181,960,000.00	248,699,200.08	-Rp66.739.200	-26,84
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	4,290,000.00	4,290,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	540,714,820.00	527,453,620.00	Rp13.261.200	2,51
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	352,480,156.00	347,081,156.00	Rp5.399.000	1,56
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	177,638,474.00	169,776,274.00	Rp7.862.200	4,63

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	10,596,190.00	10,596,190.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	30,528,783.84	30,528,783.84	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4,942,183.84	4,942,183.84	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	25,586,600.00	25,586,600.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Komputer	933,866,488.75	1,287,851,238.97	-Rp353.984.750	-27,49
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	712,900,238.75	1,088,005,988.75	-Rp375.105.750	-34,48
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	2,199,500.00	7,062,000.00	-Rp4.862.500	-68,85
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0.00	1,430,000.00	-Rp1.430.000	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	207,793,000.00	177,289,500.22	Rp30.503.500	17,21
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10,973,750.00	14,063,750.00	-Rp3.090.000	-21,97
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	0.00	15,136,099.00	-Rp15.136.099	-100,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0.00	15,136,099.00	-Rp15.136.099	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,909,359,135.03	3,196,369,279.88	-Rp287.010.145	-8,98
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2,805,543,259.53	3,092,627,101.04	-Rp287.083.842	-9,28
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	383,498,615.92	717,017,500.58	-Rp333.518.885	-46,51
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	21,415,519.10	21,415,519.10	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1,000,000.00	1,000,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	116,544,704.69	115,809,846.06	Rp734.859	0,63
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	712,600,890.35	667,708,322.40	Rp44.892.568	6,72
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	105,849,050.97	105,849,050.97	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	34,019,482.74	33,605,788.86	Rp413.694	1,23
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	81,349,187.45	81,349,187.45	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4,291,111.11	4,210,416.67	Rp80.694	1,92
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	30,624,056.80	30,624,056.80	Rp0	0,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	47,508,206.35	47,508,206.35	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1,247,473,418.05	1,247,160,189.80	Rp313.228	0,03
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	12,091,080.00	12,091,080.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	7,277,936.00	7,277,936.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Monumen	7,910,800.00	7,910,800.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	7,910,800.00	7,910,800.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	95,905,075.50	95,831,378.84	Rp73.697	0,08
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	12,807,750.00	12,807,750.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	83,097,325.50	83,023,628.84	Rp73.697	0,09
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	686,485,566.87	686,267,726.60	Rp217.840	0,03
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	414,565,086.94	414,388,280.00	Rp176.807	0,04
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	405,724,740.00	405,724,740.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	8,840,346.94	8,663,540.00	Rp176.807	2,04
Beban Penyusutan Bangunan Air	179,458,859.85	179,458,859.85	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	21,219,960.00	21,219,960.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	8,091,128.00	8,091,128.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	31,412,402.52	31,412,402.52	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman	10,318,500.00	10,318,500.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	8,443,002.43	8,443,002.43	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	67,331,644.40	67,331,644.40	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	32,642,222.50	32,642,222.50	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	52,886,728.83	52,845,695.50	Rp41.033	0,08
Beban Penyusutan Instalasi	500,000.00	500,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	16,823,111.03	16,823,111.03	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	1,896,000.00	1,854,966.67	Rp41.033	2,21
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	26,481,717.80	26,481,717.80	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	7,185,900.00	7,185,900.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	39,574,891.25	39,574,891.25	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	2,616,000.00	2,616,000.00	Rp0	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	36,958,891.25	36,958,891.25	Rp0	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	182,740,647,751.49	200,450,527,038.37	-Rp17.709.879.287	-8,84
JUMLAH BEBAN	182,740,647,751.49	200,450,527,038.37	-Rp17.709.879.287	-8,84
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	(182,721,018,241.05)	(200,430,916,548.81)	Rp17.709.898.308	-8,84
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00	Rp0	0,00
<u>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</u>	0.00	0.00	Rp0	0,00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0.00	0.00	Rp0	0,00
<u>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</u>	0.00	0.00	Rp0	0,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0.00	0.00	Rp0	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	0.00	0.00	Rp0	0,00
POS LUAR BIASA	0.00	0.00	Rp0	0,00
<u>PENDAPATAN LUAR BIASA-LO</u>	0.00	0.00	Rp0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	0.00	0.00	Rp0	0,00
<u>BEBAN LUAR BIASA-LO</u>	0.00	0.00	Rp0	0,00
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA-LO	0.00	0.00	Rp0	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0.00	0.00	Rp0	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(182,721,018,241.05)	(200,430,916,548.81)	Rp17.709.898.308	-8,84

Banda Aceh, 26 Mei 2025

 Pengguna Anggaran 


Khodri, S.Ag., MA
NIP. 19770611 200212 1 003

PEMERINTAH ACEH
4.02.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DPRA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31/Des/2024 DAN 2023

URAIAN	2024	2023
Ekuitas	203.864.087.493,09	211,837,957,539.58
RK PPKD	173.834.462.084,00	192,245,775,834.00
Surplus/Defisit-LO	(182.721.018.241,05)	(200,430,916,548.81)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0.00
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(0,47)	0.47
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	5.238.879.709,76	211,270,667.85
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	(7.057.308.991,00)	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	193.159.102.054,33	203.864.087.493,09

Banda Aceh, 26 Mei 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Khudri, S.Ag., MA
19770611 200212 1 003

PEMERINTAH ACEH
4.02.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DPRA
N E R A C A
PER 31Desember2024 DAN 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
ASET	193.411.946.104,41	204.233.306.468,61
ASET LANCAR	477.530.788,97	408.576.097,92
Beban Dibayar Dimuka	269.579.963,97	163.470.208,92
Beban Dibayar Dimuka	269.579.963,97	163.470.208,92
Beban Dibayar Dimuka	269.579.963,97	163.470.208,92
Beban Dibayar Dimuka	269.579.963,97	163.470.208,92
Persediaan	207.950.825,00	245.105.889,00
Barang Pakai Habis	207.950.825,00	245.105.889,00
Bahan	81.149.325,00	80.024.739,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	81.149.325,00	79.154.739,00
Bahan Lainnya	0,00	870.000,00
Suku Cadang	5.976.000,00	6.308.000,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	5.976.000,00	6.308.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	120.825.500,00	158.773.150,00
Alat Tulis Kantor	60.833.150,00	35.309.250,00
Bahan Cetak	38.405.000,00	101.793.000,00
Alat Listrik	8.618.000,00	7.465.500,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.969.350,00	14.205.400,00
ASET TETAP	192.144.472.375,44	200.457.670.439,69
Tanah	72.524.678.500,00	72.524.678.500,00
Tanah	72.524.678.500,00	72.524.678.500,00
Tanah Persil	72.524.678.500,00	72.524.678.500,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.868.178.500,00	30.868.178.500,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	41.656.500.000,00	41.656.500.000,00
Peralatan dan Mesin	103.576.635.233,22	106.543.431.633,69
Alat Besar	3.787.992.750,00	3.976.525.950,00
Alat Bantu	3.787.992.750,00	3.976.525.950,00
Feeder	881.000.000,00	881.000.000,00
Electric Generating Set	2.623.601.000,00	2.623.601.000,00
Pompa	283.391.750,00	471.924.950,00
Alat Angkutan	29.520.235.960,00	29.520.235.960,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	29.517.235.960,00	29.517.235.960,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.693.686.000,00	8.693.686.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	18.234.575.000,00	18.234.575.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.572.075.000,00	1.572.075.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	303.399.960,00	303.399.960,00
Kendaraan Bermotor Khusus	713.500.000,00	713.500.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	3.000.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	78.168.900,00	78.168.900,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	55.868.900,00	55.868.900,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Perkakas Standard (Standard Tools)	28.758.900,00	28.758.900,00
Perkakas Khusus (Special Tools)	2.640.000,00	2.640.000,00
Peralatan Tukang Besi	1.670.000,00	1.670.000,00
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	22.800.000,00	22.800.000,00
Alat Ukur	22.300.000,00	22.300.000,00
Alat Ukur Universal	22.300.000,00	22.300.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.667.858.781,00	58.669.882.881,39
Alat Kantor	9.717.969.484,00	10.047.421.484,01
Mesin Ketik	9.260.000,00	9.260.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	98.325.500,00	98.325.500,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	323.351.000,00	323.351.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.065.489.844,00	5.065.489.844,00
Alat Kantor Lainnya	4.221.543.140,00	4.550.995.140,01
Alat Rumah Tangga	43.254.033.429,00	45.969.951.029,00
Mebel	13.117.896.766,00	13.029.862.666,00
Alat Pengukur Waktu	72.750.000,00	72.750.000,00
Alat Pembersih	1.386.438.206,00	1.386.438.206,00
Alat Pendingin	11.269.140.440,00	11.959.489.440,00
Alat Dapur	1.314.792.360,00	1.292.422.360,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.927.506.457,00	18.063.479.157,00
Alat Pemadam Kebakaran	165.509.200,00	165.509.200,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.695.855.868,00	2.652.510.368,38
Meja Kerja Pejabat	339.863.340,00	306.396.840,00
Meja Rapat Pejabat	21.285.000,00	21.285.000,00
Kursi Kerja Pejabat	651.378.488,00	641.499.488,00
Kursi Rapat Pejabat	333.696.000,00	333.696.000,38
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	333.724.000,00	333.724.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	1.015.909.040,00	1.015.909.040,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.531.664.100,00	3.427.864.100,00
Alat Studio	3.331.591.150,00	3.227.791.150,00
Peralatan Studio Audio	1.993.182.780,00	1.961.182.780,00
Peralatan Studio Video dan Film	1.258.408.370,00	1.186.608.370,00
Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00
Alat Komunikasi	159.172.950,00	159.172.950,00
Alat Komunikasi Telephone	159.172.950,00	159.172.950,00
Peralatan Pemancar	40.900.000,00	40.900.000,00
Peralatan Antena SHF/Parabola	5.400.000,00	5.400.000,00
Feeder	26.700.000,00	26.700.000,00
Program Input Equipment	8.800.000,00	8.800.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.843.615.289,22	1.843.615.289,22
Alat Kedokteran	1.843.615.289,22	1.843.615.289,22
Alat Kedokteran Umum	316.394.389,22	316.394.389,22
Alat Kedokteran Gigi	1.462.027.300,00	1.462.027.300,00
Alat Kedokteran THT	6.210.000,00	6.210.000,00
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	25.703.500,00	25.703.500,00
Alat Kedokteran Anak	16.105.000,00	16.105.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	1.400.000,00	1.400.000,00
Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.445.100,00	4.445.100,00
Alat Kedokteran Gawat Darurat	8.270.000,00	8.270.000,00
Alat Kedokteran Traditional Medicine	3.060.000,00	3.060.000,00
Alat Laboratorium	5.058.000,00	5.058.000,00
Unit Alat Laboratorium	1.350.000,00	1.350.000,00
Alat Laboratorium Oseanografi	1.350.000,00	1.350.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	1.140.000,00	1.140.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.140.000,00	1.140.000,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	2.568.000,00	2.568.000,00
Alat Ukur Fisika Kesehatan	2.568.000,00	2.568.000,00
Komputer	8.974.419.255,00	8.854.458.355,08
Komputer Unit	7.261.249.155,00	7.439.708.255,00
Komputer Jaringan	973.661.000,00	521.311.000,00
Personal Computer	5.383.302.200,00	6.035.811.300,00
Komputer Unit Lainnya	904.285.955,00	882.585.955,00
Peralatan Komputer	1.713.170.100,00	1.414.750.100,08
Peralatan Mainframe	52.600.000,00	52.600.000,00
Peralatan Mini Computer	50.100.000,00	50.100.000,00
Peralatan Personal Computer	1.020.828.100,00	1.020.828.100,08
Peralatan Jaringan	205.235.000,00	205.235.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	384.407.000,00	85.987.000,00
Alat Eksplorasi	95.130.000,00	95.130.000,00
Alat Eksplorasi Geofisika	95.130.000,00	95.130.000,00
Elektronik/Electric	95.130.000,00	95.130.000,00
Rambu-rambu	72.492.198,00	72.492.198,00
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	52.692.198,00	52.692.198,00
Rambu Tidak Bersuar	52.692.198,00	52.692.198,00
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	19.800.000,00	19.800.000,00
Runway/Threshold Light	19.800.000,00	19.800.000,00
Gedung dan Bangunan	144.797.693.753,00	144.398.058.562,00
Bangunan Gedung	139.209.964.700,00	138.810.329.509,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.869.260.964,00	75.469.625.773,00
Bangunan Gedung Kantor	27.308.617.447,00	26.908.982.256,00
Bangunan Gudang	1.122.295.040,00	1.122.295.040,00
Bangunan Gedung Instalasi	50.000.000,00	50.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.760.089.525,00	5.760.089.525,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.161.734.689,00	26.161.734.689,00
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.357.055.884,00	5.357.055.884,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.709.470.308,00	1.709.470.308,00
Bangunan Terbuka	4.139.938.778,00	4.139.938.778,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	208.100.000,00	208.100.000,00
Bangunan Fasilitas Umum	1.563.510.900,00	1.563.510.900,00
Taman	2.488.448.393,00	2.488.448.393,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	63.340.703.736,00	63.340.703.736,00
Rumah Negara Golongan I	62.372.252.936,00	62.372.252.936,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Flat/Rumah Susun	604.554.000,00	604.554.000,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	363.896.800,00	363.896.800,00
Monumen	395.540.000,00	395.540.000,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	395.540.000,00	395.540.000,00
Tugu	395.540.000,00	395.540.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.192.189.053,00	5.192.189.053,00
Tugu/Tanda Batas	5.192.189.053,00	5.192.189.053,00
Tugu/Tanda Batas Administrasi	640.387.500,00	640.387.500,00
Pagar	4.551.801.553,00	4.551.801.553,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.948.542.089,00	17.948.542.089,00
Jalan dan Jembatan	6.326.602.100,00	6.326.602.100,00
Jalan	5.893.425.100,00	5.893.425.100,00
Jalan Khusus	5.893.425.100,00	5.893.425.100,00
Jembatan	433.177.000,00	433.177.000,00
Jembatan pada Jalan Khusus	433.177.000,00	433.177.000,00
Bangunan Air	8.192.648.689,00	8.192.648.689,00
Bangunan Air Irigasi	1.060.998.000,00	1.060.998.000,00
Bangunan Pembawa Irigasi	1.060.998.000,00	1.060.998.000,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.141.781.716,00	2.141.781.716,00
Bangunan Pembawa Pasang Surut	404.556.400,00	404.556.400,00
Saluran Pembuang Pasang Surut	1.737.225.316,00	1.737.225.316,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	311.650.100,00	311.650.100,00
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	311.650.100,00	311.650.100,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	309.555.000,00	309.555.000,00
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	309.555.000,00	309.555.000,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.030.985.873,00	3.030.985.873,00
Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	337.720.097,00	337.720.097,00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.693.265.776,00	2.693.265.776,00
Bangunan Air Kotor	1.337.678.000,00	1.337.678.000,00
Bangunan Pelengkap Air Kotor	1.337.678.000,00	1.337.678.000,00
Instalasi	1.865.804.500,00	1.865.804.500,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	541.735.100,00	541.735.100,00
Instalasi Air Tanah Dalam	15.000.000,00	15.000.000,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	327.150.000,00	327.150.000,00
Instalasi Air Bersih Bangunan	199.585.100,00	199.585.100,00
Instalasi Air Kotor	55.649.000,00	55.649.000,00
Instalasi Air Buangan Domestik	55.649.000,00	55.649.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	1.124.702.400,00	1.124.702.400,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1.124.702.400,00	1.124.702.400,00
Instalasi Lain	143.718.000,00	143.718.000,00
Instalasi Lain	143.718.000,00	143.718.000,00
Jaringan	1.563.486.800,00	1.563.486.800,00
Jaringan Air Minum	78.480.000,00	78.480.000,00
Jaringan Sambungan ke Rumah	78.480.000,00	78.480.000,00
Jaringan Listrik	1.485.006.800,00	1.485.006.800,00
Jaringan Transmisi	1.485.006.800,00	1.485.006.800,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Aset Tetap Lainnya	3.383.580.688,00	3.241.747.525,00
Bahan Perpustakaan	3.383.580.688,00	3.241.747.525,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	3.379.090.563,00	3.237.257.400,00
Buku Umum	320.865.865,00	320.865.865,00
Buku Filsafat	12.700.300,00	12.700.300,00
Buku Agama	262.603.240,00	262.603.240,00
Buku Ilmu Sosial	527.418.385,00	527.418.385,00
Buku Ilmu Bahasa	17.685.650,00	17.685.650,00
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	696.000,00	696.000,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	40.535.890,00	40.535.890,00
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	749.675.133,00	607.841.970,00
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	20.018.100,00	20.018.100,00
Buku Laporan	1.426.892.000,00	1.426.892.000,00
Kartografi, Naskah dan Lukisan	4.490.125,00	4.490.125,00
Bahan Kartografi	4.490.125,00	4.490.125,00
Akumulasi Penyusutan	(150.086.657.887,78)	(144.198.787.870,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(95.045.813.827,53)	(91.907.672.801,89)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(3.723.607.571,43)	(3.801.001.878,58)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	(881.000.000,00)	(881.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(2.638.058.142,86)	(2.634.443.857,15)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(204.549.428,57)	(285.558.021,43)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(26.313.417.959,84)	(24.330.847.263,84)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(4.016.876.800,00)	(4.016.876.800,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(19.734.621.800,00)	(17.891.284.600,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(1.572.075.000,00)	(1.476.215.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(272.305.976,00)	(264.532.480,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(714.538.383,84)	(678.938.383,84)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(74.780.900,00)	(70.381.120,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(28.758.900,00)	(27.747.120,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	(2.112.000,00)	(1.584.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(1.670.000,00)	(1.670.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(22.800.000,00)	(22.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(19.440.000,00)	(16.580.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(52.063.117.699,68)	(51.587.673.835,48)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(15.260.000,00)	(13.760.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(98.325.500,00)	(98.325.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(393.740.600,00)	(321.295.400,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(5.958.991.070,40)	(5.412.138.893,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(3.294.979.664,00)	(3.376.591.276,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(10.793.356.249,00)	(9.988.358.244,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(63.390.000,00)	(54.030.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.378.201.423,60)	(1.291.320.282,40)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(10.738.485.384,00)	(10.978.155.956,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.342.505.560,00)	(1.196.643.996,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(14.338.684.194,00)	(15.446.519.995,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(283.334.160,00)	(253.877.920,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(271.591.566,60)	(258.586.844,40)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(20.468.000,00)	(14.491.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(643.475.288,00)	(641.499.488,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(1.061.536.000,08)	(879.576.000,08)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(333.724.000,00)	(333.724.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(1.033.069.040,00)	(1.028.779.040,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2.814.968.588,00)	(2.274.253.768,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(1.500.860.076,00)	(1.148.379.920,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(1.124.755.942,00)	(947.117.468,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(148.452.570,00)	(137.856.380,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(5.400.000,00)	(5.400.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder	(26.700.000,00)	(26.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	(8.800.000,00)	(8.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.816.378.905,36)	(1.785.850.121,52)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(315.763.605,36)	(310.821.421,52)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(1.436.440.700,00)	(1.410.854.100,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	(6.210.000,00)	(6.210.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(24.684.500,00)	(24.684.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(16.105.000,00)	(16.105.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	(1.400.000,00)	(1.400.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(4.445.100,00)	(4.445.100,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(8.270.000,00)	(8.270.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	(3.060.000,00)	(3.060.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(5.058.000,00)	(5.058.000,00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	(1.350.000,00)	(1.350.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(1.140.000,00)	(1.140.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	(2.568.000,00)	(2.568.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(8.066.862.005,22)	(7.884.984.616,47)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(521.311.000,00)	(521.311.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(6.159.424.405,00)	(6.198.513.266,25)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(59.198.500,00)	(56.999.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(5.720.000,00)	(5.720.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(1.189.233.100,22)	(981.440.100,22)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(131.975.000,00)	(121.001.250,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(95.130.000,00)	(95.130.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	(95.130.000,00)	(95.130.000,00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(72.492.198,00)	(72.492.198,00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(52.692.198,00)	(52.692.198,00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light	(19.800.000,00)	(19.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(46.718.419.063,48)	(44.649.461.096,72)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(45.271.114.372,23)	(43.303.835.077,64)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(9.727.659.303,98)	(10.026.526.502,57)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(184.904.056,50)	(163.488.537,40)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(12.000.000,00)	(11.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(1.780.020.165,58)	(1.139.395.282,79)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(11.686.305.949,13)	(11.581.223.064,45)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(667.744.426,68)	(561.895.375,71)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(499.238.525,12)	(477.629.858,71)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(1.154.854.042,35)	(1.073.504.854,90)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(61.822.222,23)	(59.629.166,68)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(459.169.312,00)	(428.545.255,20)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(554.293.509,23)	(506.785.302,88)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(18.260.533.835,43)	(17.071.011.868,35)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	(193.457.280,00)	(181.366.200,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	(29.111.744,00)	(21.833.808,00)
Akumulasi Penyusutan Monumen	(94.929.600,00)	(87.018.800,00)
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(94.929.600,00)	(87.018.800,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(1.352.375.091,25)	(1.258.607.219,08)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(158.663.450,00)	(145.855.700,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(1.193.711.641,25)	(1.112.751.519,08)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.322.424.996,77)	(7.641.653.971,39)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4.447.333.078,78)	(4.038.072.200,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(4.270.526.140,00)	(3.864.801.400,00)
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	(176.806.938,78)	(173.270.800,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(2.741.369.708,65)	(2.561.910.848,80)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(312.534.600,00)	(291.314.640,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	(56.637.896,00)	(48.546.768,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	(543.554.020,08)	(512.141.617,56)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(311.650.100,00)	(311.650.100,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(123.822.000,00)	(113.503.500,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(151.974.043,67)	(143.531.041,24)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(654.290.166,40)	(586.958.522,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	(586.906.882,50)	(554.264.660,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(585.425.294,35)	(532.948.898,85)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	(10.000.000,00)	(9.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(133.527.392,84)	(116.704.281,81)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(29.940.000,01)	(28.454.333,34)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(383.214.301,50)	(356.732.583,70)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	(28.743.600,00)	(21.557.700,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(548.296.914,99)	(508.722.023,74)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	(39.240.000,00)	(36.624.000,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(509.056.914,99)	(472.098.023,74)
ASET LAINNYA	789.942.940,00	3.367.059.931,00
Aset Tidak Berwujud	273.281.000,00	273.281.000,00
Aset Tidak Berwujud	273.281.000,00	273.281.000,00
Aset Tidak Berwujud	273.281.000,00	273.281.000,00
Software	273.281.000,00	273.281.000,00
Aset Lain-lain	789.942.940,00	3.367.059.931,00
Aset Lain-lain	789.942.940,00	3.367.059.931,00
Aset Lain-lain	225.747.900,00	2.802.864.891,00
Aset Rusak Berat/Usang	7.283.056.891,00	2.802.864.891,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(7.057.308.991,00)	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.	564.195.040,00	564.195.040,00
Aset Lain-lain Dalam Penelusuran Hilang	564.195.040,00	564.195.040,00
Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	0,00	17.139.100,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Akan Dihilangkan	0,00	(17.139.100,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(273.281.000,00)	(273.281.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(273.281.000,00)	(273.281.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(273.281.000,00)	(273.281.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(273.281.000,00)	(273.281.000,00)
JUMLAH ASET	193.411.946.104,41	204.233.306.468,61
KEWAJIBAN	252.844.050,08	369.218.975,52
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	252.844.050,08	369.218.975,52
Pendapatan Diterima Dimuka	1.139.178,08	1.148.688,52
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	1.139.178,08	1.148.688,52
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	1.139.178,08	1.148.688,52
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	1.139.178,08	1.148.688,52
Utang Belanja	251.704.872,00	368.070.287,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	251.704.872,00	368.070.287,00
Utang Belanja Jasa	251.704.872,00	368.070.287,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	241.650,00	225.285,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	60.856.160,00	60.826.340,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	190.607.062,00	307.018.662,00
JUMLAH KEWAJIBAN	252.844.050,08	369.218.975,52
EKUITAS	193.159.102.054,33	203.864.087.493,09
EKUITAS	193.159.102.054,33	203.864.087.493,09
Ekuitas	19.324.639.970,33	11.618.311.659,09

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Ekuitas	202.045.658.211,38	212.049.228.207,90
Ekuitas	203.864.087.493,09	211.837.957.539,58
Ekuitas	203.864.087.493,09	211.837.957.539,58
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(1.818.429.281,71)	211.270.668,32
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(0,47)	0,47
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	5.238.879.709,76	211.270.667,85
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Lalu	(7.057.308.991,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO	(182.721.018.241,05)	(200.430.916.548,81)
Surplus/Defisit-LO	(182.721.018.241,05)	(200.430.916.548,81)
Surplus/Defisit-LO	(182.721.018.241,05)	(200.430.916.548,81)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	173.834.462.084,00	192.245.775.834,00
RK PPKD	173.834.462.084,00	192.245.775.834,00
RK PPKD	173.834.462.084,00	192.245.775.834,00
RK PPKD	173.834.462.084,00	192.245.775.834,00
JUMLAH EKUITAS DANA	193.159.102.054,33	203.864.087.493,09
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	193.411.946.104,41	204.233.306.468,61

Banda Aceh, 26 Mei 2025
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


Khudri, S.Ag., MA
NIP. 19770611 200212 1 003

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2024 untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Tahun 2024 Nomor 03);
18. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 5) dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 46);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 47);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 16).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Neraca.

Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2024, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Aceh, dalam hal ini di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Sekretariat DPRA adalah di bidang pengeluaran. Pengguna Anggaran melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan secara operasional dan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membandingkan antara Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (tahun berjalan) dengan tahun 2023 (tahun sebelumnya). Begitupun terhadap penyajian Neraca pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang membandingkan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024, Sekretariat DPRA mengelola 2 program dalam urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Dimana dari masing-masing program tersebut terdapat 18 kegiatan dan 69 sub kegiatan yang mengikutinya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ;

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 8. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 13. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 18. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 22. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 28. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 29. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 30. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD
 - 31. Fasilitas Fraksi DPRD
 - 32. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - 33. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD ;
- k. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 34. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 35. Pembahasan Rancangan Perda
 - 36. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - 37. Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik
 - 38. Penyusunan Tata Tertib DPRD
 - l. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 39. Pembahasan KUA dan PPAS
 - 40. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 41. Pembahasan APBD
 - 42. Pembahasan Perubahan APBD
 - 43. Pembahasan Laporan Semester
 - 44. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - m. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 45. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 46. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 47. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 48. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 49. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

50. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
51. Pengawasan Penggunaan Anggaran
52. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- n. Peningkatan Kapasitas DPRD
 53. Orientasi DPRD
 54. Pendalaman Tugas DPRD
 55. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 56. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 57. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 58. Penyusunan Program Kerja DPRD
 59. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- o. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 60. Kunjungan Kerja dalam Daerah
 61. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 62. Pelaksanaan Reses
- p. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 63. Pengawasan Kode Etik DPRD
- q. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 64. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- r. Fasilitasi Tugas DPRD
 65. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 66. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 67. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 68. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 69. Fasilitasi Tugas Panitia Khusus

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran pendapatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebesar Rp19.620.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp19.620.000,00 yang bersumber dari sewa Ruang ATM dan sewa Kantin tahun anggaran 2024. Sementara itu anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp178.677.582.483,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp176.619.612.089,00 dan belanja modal sebesar Rp2.057.970.394,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp173.854.082.084,00 atau 97,30% dari pagu anggaran keseluruhan.

Realisasi per kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	178.677.582.483	173.854.082.084	97,30
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	104.956.630.926	103.308.412.759	98,43
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.433.092	246.771.092	99,73
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.313.264	104.203.264	99,89
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	105.534.728	105.005.728	99,50
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.251.100	22.228.100	99,90
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.334.000	15.334.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.919.089.077	20.909.158.612	99,95
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.759.052.102	18.759.052.102	100
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ASN	2.015.567.375	2.015.567.374	100
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.338.000	93.407.536	90,39
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.141.800	31.141.800	100
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.140.000	2.140.000	100
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.849.800	7.849.800	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	209.232.000	108.577.960	51,89
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	209.232.000	108.577.960	51,89
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	340.142.000	269.186.022	79,14
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.950.000	70.096.500	98,80
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	186.902.000	181.667.122	97,20
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.290.000	17.422.400	21,17

Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.659.377.431	2.473.638.465	93,02
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.729.627.797	1.575.594.015	91,09
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.110.634	137.246.250	87,36
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	280.884.000	280.884.000	100
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	290.000.000	289.525.000	99,84
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.755.000	190.389.200	94,37
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.797.267.200	1.784.267.200	99,28
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.797.267.200	1.784.267.200	99,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.624.434.378	15.106.968.677	96,69
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.060.325.279	4.953.189.768	97,88
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.557.220	244.977.013	71,51
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.221.551.879	9.908.801.896	96,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.704.220.490	4.592.068.572	97,62
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.628.850	287.454.885	99,94
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.440.059.306	2.354.745.266	96,50
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	772.157.534	771.662.531	99,94
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.204.374.800	1.178.205.890	97,83
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		53.506.906.084	52.888.364.382	98,84
28	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50.927.692.284	50.309.963.382	98,79
29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.385.891.000	2.385.891.000	100
30	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	193.322.800	192.510.000	99,58
Layanan Adminstrasi DPRD		4.948.529.174	4.929.411.777	99,61
31	Fasilitasi Fraksi DPRD	68.480.000	67.730.000	98,90
32	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	168.847.760	154.860.000	91,72
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.711.201.414	4.706.821.777	99,91
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		73.720.951.557	70.545.669.325	95,69
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		10.699.172.137	10.480.037.329	97,95
34	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	233.858.000	217.888.708	93,17
35	Pembahasan Rancangan Perda	8.612.988.081	8.504.172.514	98,74
36	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	630.295.156	630.295.156	100
37	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	375.000.000	375.000.000	100
38	Penyusunan Tata Tertib DPRD	847.030.900	752.680.951	88,86
Pembahasan Kebijakan Anggaran		1.305.189.950	1.256.624.727	96,28
39	Pembahasan KUA dan PPAS	91.434.600	91.033.000	99,56
40	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.324.600	19.982.800	98,32
41	Pembahasan APBD	1.046.360.600	998.800.017	95,45
42	Pembahasan Perubahan APBD	61.056.430	61.056.430	100
43	Pembahasan Laporan Semester	5.474.600	5.473.360	99,98
44	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	80.539.120	80.279.120	99,68
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		6.030.657.350	5.980.515.506	99,17
45	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	486.524.300	481.963.300	99,06
46	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	515.920.300	512.166.200	99,27
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	840.668.600	816.893.900	97,17
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	433.412.300	425.657.600	98,21
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	433.412.300	429.562.800	99,11
50	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	579.252.000	577.040.860	99,62
51	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.209.915.000	2.206.208.780	99,83

52	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	531.552.550	531.022.066	99,90
Peningkatan Kapasitas DPRD		10.426.549.117	10.223.734.047	98,05
53	Orientasi DPRD	2.191.981.002	2.139.980.979	97,63
54	Pendalaman Tugas DPRD	1.302.324.000	1.284.700.985	98,65
55	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.544.000.000	1.448.000.000	93,78
56	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	355.700.000	344.000.000	96,71
57	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	690.005.000	687.787.980	99,68
58	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.073.049.115	1.062.590.793	99,03
59	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3.269.490.000	3.256.673.310	99,61
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		32.028.538.039	30.909.700.620	96,51
60	Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.512.748.799	10.832.820.170	94,09
61	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	158.565.380	149.449.950	94,25
62	Pelaksanaan Reses	20.357.223.860	19.927.430.500	97,89
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		600.058.300	451.575.250	75,26
63	Pengawasan Kode Etik DPRD	600.058.300	451.575.250	75,26
Pembahasan Kerja Sama Daerah		28.834.920	21.085.000	73,12
64	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	28.834.920	21.085.000	73,12
Fasilitasi Tugas DPRD		12.601.951.744	11.222.396.846	89,05
65	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.990.065.608	3.045.036.204	76,32
66	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	115.396.098	115.396.098	100
67	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.668.527.280	1.586.822.120	95,10
68	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.222.179.308	5.869.358.974	94,33
69	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	605.783.450	605.783.450	100

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Permasalahan secara umum yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Perubahan-perubahan agenda kerja lembaga DPRA yang masih sering terjadi mengakibatkan Implementasi Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun tidak berjalan secara optimal. Namun hal ini terbilang wajar untuk lembaga politik seperti DPRA.
- Pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRA sangat dipengaruhi oleh kinerja lembaga DPRA, sehingga sulit untuk mengukur tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRA dari sudut pandang realisasi anggaran.
- Terjadinya keterlambatan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA serta keterlambatan penetapan Qanun APBA Tahun Anggaran 2024, yaitu tanggal 18 Maret 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2022 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban

diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO

Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

Pengakuan Beban

Diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan Belanja

Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi

Diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang.

pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut

setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.01	Kas dan Setara Kas			
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
		Potongan PFK di SKPA yang Belum Disetor	√	-
		Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
1.1.01.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
		Uang Transitoris BLUD	√	-
1.1.01.05	Kas Dana BOS	Kas Dana BOS	√	-
1.1.01.07	Kas Lainnya	Kas Lainnya	√	-
1.1.01.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√*	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
 - Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Akuntansi Piutang

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.03	Piutang Pajak Aceh	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Pajak Air Permukaan	√	-
		Piutang Pajak Rokok	-	√
		Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Aceh	Piutang Retribusi Jasa Umum	√	-
		Piutang Retribusi Jasa Usaha	√	-
		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada BUMA	-	√
1.1.06	Piutang Lain-Lain PAA Yang Sah	Piutang Hasil Penjualan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Pemanfaatan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-	√
		Piutang Jasa Giro	-	√
		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	√
		Piutang Pendapatan Bunga	-	√
		Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	√
		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	√
		Piutang Pendapatan Denda Pajak Aceh	√	-
		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Aceh	√	-
		Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	√	√
		Piutang Pendapatan dari Pengembalian	√	√
		Piutang Pendapatan BLUD	√	-
		Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	SKPKA	
	Bergulir			
	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	√	√	
	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	√	√	
	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	√	-	
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Piutang Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	√
		Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	-	√
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	Piutang Bagi Hasil	-	√
		Piutang Bantuan Keuangan	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka	-	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.11	Belanja Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
 - a. Pungutan
 - Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Aceh;
 - 2) Piutang Retribusi Aceh;
 - 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.
 - b. Perikatan
 - Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas;
 - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
 - c. Transfer antar Pemerintahan
 - Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

- 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian
- Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:
- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
- e. Transaksi Dibayar Dimuka
- Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel.

Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Persediaan Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku cadang	√	-
		Alat/bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk dijual/diserahkan	√	-
		Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.12.02	Barang Tidak habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
 - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
 - a. Pendekatan aset

Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
 - b. Pendekatan beban.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak.

Akuntansi Investasi

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN)	-	√
		Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	√
		Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal	-	√
		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
 - a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
 - b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.

- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Akuntansi Dana Bergulir

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur "Dana Bergulir", namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari

dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir

- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

Akuntansi Aset Tetap

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.3.01	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
		Tanah BLUD	√	-
1.3.02	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Alat Pertanian	√	-
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	√	-
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	√	-
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	√	-
		Alat Laboratorium	√	-
		Alat Persenjataan	√	-
		Komputer	√	-
		Alat Eksplorasi	√	-
		Alat Pengeboran	√	-
		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	√	-
		Alat Bantu Eksplorasi	√	-
		Alat Keselamatan Kerja	√	-
		Alat Peraga	√	-
		Peralatan Proses/Produksi	√	-
		Rambu-rambu	√	-
		Peralatan Olahraga	√	-
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	√	-
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Jaringan	√	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Biota Perairan	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
	Barang Koleksi Non Budaya	√	-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	√	-
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. • Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan

yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka

penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.

- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (straight line method).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Jaringan dan Irigasi Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
 - f. Apabila Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional	-	√
		Dst....	-	√

- b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
				SKPA	PPKA
LRA	LO				
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga Deposito	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
 - Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
 - Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan, dan Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan.

Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
- c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
- 1) Software
Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 - 2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - 3) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - 4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja Sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.
- Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. Informasi lainnya yang penting.

Akuntansi Kewajiban

Definisi:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada

pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√ ^a	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√ ^a	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketentuan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketentuan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
 - b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Akuntansi Pendapatan

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.

- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
- Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.
- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
8.1	Beban Operasi – LO		
8.1.01	Beban Pegawai	√	-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.03	Beban Bunga	-	√
8.1.04	Beban Subsidi	√	√
8.1.05	Beban Hibah	√	√
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	√	√
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	√	-
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	√	-
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	√	√
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	√
8.3	Beban Transfer		
8.3.01	Beban Bagi Hasil	-	√
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.4	Beban Tak Terduga		
8.4.01	Beban Tak Terduga	-	√
8.5	Beban Defisit Non Operasional		
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	√	√
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	√

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	√	√
5.1.05	Belanja Hibah	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
 - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
 - a. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
 - b. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
 - a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
 - b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Akuntansi Transfer

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
 - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

Akuntansi Pembiayaan

Definisi:

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Akuntansi Koreksi Kesalahan

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1.	Pendapatan	Realisasi 2024 Rp19.620.000,00	Realisasi 2023 Rp19.620.000,00
--------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp19.620.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.620.000,00 Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2024	TA 2023	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	19.620.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00	100
Jumlah Pendapatan		19.620.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00	100

Sumber:.....

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

- 1
- Pendapatan atas Sewa Kantin Kantor Sekretariat DPRA sebesar Rp15.000.000,00 periode 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 sesuai perjanjian sewa-menyewa Nomor: 000.2.3.2/048/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024 dengan STS Nomor: 00001/STS/4.02.0.00.0.00.01/A01/II/2024 Tanggal 05 Juni 2024
- 2
- Pendapatan atas Sewa Menyewa Penempatan ATM antara Sekretariat DPRA dengan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama sebesar Rp4.620.000,00 periode 01 April 2024 s.d 31 Maret 2025 sesuai perjanjian sewa-menyewa Nomor: 100.3.7.1/485/SPK/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 dan Nomor: 060/SPK/KCU.01/IV/2024 dengan STS Nomor: 00002/STS/4.02.0.00.0.00.01/A01/III/2024 Tanggal 25 Juli 2024.

5.1.2.	Belanja	Realisasi 2024 Rp173.854.082.084,00	Realisasi 2023 Rp192.265.395.834,00
--------	---------	--	--

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp173.854.082.084,00 atau 97,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp178.677.582.483,00 Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2 Realisasi Anggaran Belanja TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2024	TA 2023	
1	Belanja Operasi	176.619.612.089,00	171.799.218.130,00	187.676.058.028,00	97,27
2	Belanja Modal	2.057.970.394,00	2.054.863.954,00	4.589.337.806,00	99,85
Jumlah Belanja		178.677.582.483,00	173.854.082.084,00	192.265.395.834,00	97,30

Sumber:.....

5.1.2.1.	Belanja Operasi	Realisasi 2024 Rp171.799.218.130,00	Realisasi 2023 Rp187.676.058.028,00
----------	-----------------	--	--

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar Rp171.799.218.130,00 atau

97,27% dari rencana yang sebesar Rp176.619.612.089,00 Rincian belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2024	TA 2023	
1	Belanja Pegawai	70.581.250.386,00	69.963.521.484,00	66.580.979.138,00	99,12
2	Belanja Barang dan Jasa	106.038.361.703,00	101.835.696.646,00	121.095.078.890,00	96,04
Jumlah Belanja		176.619.612.089,00	171.799.218.130,00	187.676.058.028,00	97,27

Sumber:.....

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi 2024
Rp69.963.521.484,00

Realisasi 2023
Rp66.580.979.138,00

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp69.963.521.484,00 atau 40,72% dari total realisasi Belanja Operasi.

Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

N o	Rincian	Anggaran	TA 2024	TA 2023	%
1	Gaji dan Tunjangan	9.423.529.764,00	9.423.529.764,00	8.813.821.221,00	100
2	Tambahan Penghasilan PNS	9.495.902.338,00	9.495.902.338,00	7.714.875.282,00	100
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	894.506.000,00	894.506.000,00	879.219.000,00	100
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	50.407.312.284,00	49.839.683.382,00	48.807.063.635,00	98,87
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360.000.000,00	309.900.000,00	366.000.000,00	86,08
Jumlah		70.581.250.386,00	69.963.521.484,00	66.580.979.138,00	99,12

Sumber:.....

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi 2024
Rp101.835.696.646,00

Realisasi 2023
Rp121.095.078.890,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp101.835.696.646,00 atau 59,28% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No	Rincian	Anggaran	TA 2024	TA 2023	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	23.714.144.313,00	23.247.299.510,00	29.515.520.026,00	98,03
2	Belanja Jasa Kantor	25.389.666.752,00	24.659.884.184,00	27.641.113.042,00	97,13
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	673.697.225,00	650.763.974,00	636.177.017,00	96,60
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	219.957.220,00	186.803.940,00	68.806.200,00	84,93
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.478.000.000,00	1.452.057.220,00	2.003.400.000,00	98,24
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.000.000,00	491.989,00	489.961,00	6,15
7	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	302.000.000,00	-
9	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	27.405.700,00	18.764.106,00	18.176.250,00	68,47
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.281.053.396,00	3.254.474.931,00	3.278.818.942,00	99,19
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	963.667.581,00	963.667.581,00	2.341.326.110,00	100
12	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	324.430.000,00	324.164.400,00	351.167.925,00	99,92
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.958.339.516,00	47.077.324.811,00	51.719.189.804,00	94,23
14	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	3.218.893.613,00	-
Jumlah		106.038.361.703,00	101.835.696.646,00	121.095.078.890,00	96,04

Sumber:.....

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tidak dikapitalisasi kepada aset tetap karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

5.1.2.2. **Belanja Modal**

Realisasi 2024
Rp2.054.863.954,00

Realisasi 2023
Rp4.589.337.806,00

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.054.863.954,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp2.057.970.394,00. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Anggaran %
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.513.595.600,00	1.513.395.600,00	2.492.321.457,00	99,99
3	Belanja Gedung dan Bangunan	544.374.794,00	541.468.354,00	2.097.016.349,00	99,47
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		2.057.970.394,00	2.054.863.954,00	4.589.337.806,00	99,85

Sumber:.....

5.1.2.2.1. **Belanja Tanah**

Realisasi 2024
Rp0

Realisasi 2023
Rp0

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2024 sebesar Rp0 atau 0% dari total realisasi belanja modal, dan diperuntukkan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan.

Rincian belanja modal tanah TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah Persil	-	-	-	-
2	Belanja Modal Lapangan	-	-	-	-
3	Belanja Modal Tanah BLUD	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Sumber:.....

5.1.2.2.2. **Belanja Peralatan dan Mesin**

Realisasi 2024
Rp1.513.395.600,00

Realisasi 2023
Rp2.492.321.457,00

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan

perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.513.395.600,00 atau mempunyai porsi sebesar 73,65 % dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.2.2 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran	TA 2024	TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	40.740.000,00	-
2	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	141.827.152,00	-
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	526.500.100,00	526.300.100,00	1.538.085.965,00	99,96
4	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.345.500,00	43.345.500,00	43.838.340,00	100
5	Belanja Modal Alat Studio	71.800.000,00	71.800.000,00	517.950.000,00	100
6	Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	1.019.000,00	-
7	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	-	-
8	Belanja Modal Komputer Unit	573.530.000,00	573.530.000,00	178.800.000,00	100
9	Belanja Modal Peralatan Komputer	298.420.000,00	298.420.000,00	30.061.000,00	100
Jumlah		1.513.595.600,00	1.513.395.600,00	2.757.127.876,00	99,99

Sumber:.....

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi 2024
Rp541.468.354,00

Realisasi 2023
Rp2.097.016.349,00

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp541.468.354,00. Atau 26,35% dari total realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.3 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	544.374.794,00	541.468.354,00	2.097.016.349,00	99,47
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-
3	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-
4	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-	-	-	-
5	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	-
Jumlah		544.374.794,00	541.468.354,00	2.097.016.349,00	99,47

Sumber:.....

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi 2024
Rp0

Realisasi 2023
Rp0

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp0 atau 0 % dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, kontruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telpon.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.4 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan	-	-	-	-
2	Belanja Modal Jembatan	-	-	-	-
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Sumber:.....

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi 2024
Rp0

Realisasi 2023
Rp0

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp0 atau 0% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan serta dan tanaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.5 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggran	TA 2024	TA 2023	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Sumber:.....

5.1.3. Surplus/Defisit

Realisasi 2024
Rp173.854.082.084,00

Realisasi 2023
Rp192.265.395.834,00

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.620.000,00 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.854.082.084,00, Laporan Keuangan mengalami Defisit sebesar Rp 173.834.462.084,00

5.2. Laporan Operasional

5.2.1.	Pendapatan – LO	Tahun 2024 Rp19.629.510,44	Tahun 2023 Rp19.610.489,56
--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Pendapatan - LO Tahun 2024 mencapai Rp19.629.510,44 Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO	19.629.510,44	19.610.489,56	19.021	0,10
2.	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO	-	-	-	-
Jumlah		19.629.510,44	19.610.489,56	Rp19.021	0,10

Sumber: ...

Pendapatan-LRA sebesar Rp19.620.000,00 dan Pendapatan-LO sebesar Rp19.629.510,44, terdapat selisih sebesar Rp9.510,44, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENDAPATAN LRA	PIUTANG TA 2024	PENYETORAN PIUTANG TA 2021 (tambahkan kolom bila ada penyetoran piutang tahun lainnya)	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TA 2024	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TA 2023	PENDAPATAN LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6+7
Retribusi Jasa Umum							
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	19.620.000,00	-	-	1.139.178,08	1.148.688,52	19.629.510,44
JUMLAH		19.620.000,00	-	-	1.139.178,08	1.148.688,52	19.629.510,44
TOTAL		19.620.000,00	-	-	1.139.178,08	1.148.688,52	19.629.510,44

5.2.2.	Beban Operasi	Tahun 2024 Rp182.740.647.751,49	Tahun 2023 Rp200.450.527.038,37
--------	---------------	------------------------------------	------------------------------------

Beban Operasi Tahun 2024 mencapai Rp182.740.647.751,49 Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	69.963.521.484,00	66.574.979.138,00	3.388.542.346,00	-5,09
2	Beban Barang	23.284.454.574,00	29.613.738.042,00	-6.329.283.468,00	-21,37
3	Beban Jasa	26.746.290.242,95	30.732.670.288,20	-3.986.380.045,25	-12,97
4	Beban Pemeliharaan	4.542.306.912,00	5.971.312.977,00	-1.429.006.065,00	-23,93
5	Beban Perjalanan Dinas	47.077.324.811,00	54.938.083.417,00	-7.860.758.606,00	14,31
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.126.749.727,54	12.619.743.176,17	-1.492.993.449,00	-11,83
Jumlah Beban Operasi		Rp182.740.647.751,49	200.450.527.038,37	-17.709.879.287,00	-8,84

Sumber: ...

5.2.2.1.	Beban Pegawai	Tahun 2024 Rp69.963.521.484,00	Tahun 2023 Rp66.574.979.138,00
----------	---------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Tabel 5.2.2.1 Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.423.529.764,00	8.813.821.221,00	609.708.543	6,92
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.495.902.338,00	7.714.875.282,00	1.781.027.056	23,09
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	894.506.000,00	879.219.000,00	15.287.000	1,74
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	49.839.683.382,00	48.807.063.635,00	1.032.619.747	2,12

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	309.900.000,00	360.000.000,00	-50.100.000	-13,9
Jumlah		69.963.521.484,00	66.574.979.138,00	3.388.542.346	5,09

Sumber: ...

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp69.963.521.484,00 dan Beban Pegawai-LO sebesar Rp69.963.521.484,00 tidak terdapat selisih.

No	Uraian	LRA 2024	pengakuan beban BLUD	Pengakuan beban barang dan jasa	Reklas ke beban	PELUNASAN UTANG TA 2021 (jika ada tahun sebelumnya dibuatkan kolom juga)	PELUNASAN UTANG TA 2023	UTANG TA 2024	BEBAN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6-7-8+9
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.423.529.764,00							9.423.529.764,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.495.902.338,00							9.495.902.338,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	894.506.000,00							894.506.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	49.839.683.382,00							49.839.683.382,00
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	309.900.000,00							309.900.000,00
Jumlah		69.963.521.484,00	-	-	-	-	-	-	69.963.521.484,00

5.2.2.2. Beban Barang

Tahun 2024
Rp23.284.454.574,00

Tahun 2023
Rp29.613.738.042,00

Tabel 5.2.2.2 Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis **(rincikan)	23.284.454.574,00	29.613.738.042,00	-6.329.283.468	-21,37
2	Beban Barang Tak Habis Pakai **(rincikan)	-	-	-	-
Total Beban Barang		23.284.454.574,00	29.613.738.042,00	-6.329.283.468	-21,37

Belanja Barang Pakai Habis -LRA sebesar Rp23.247.299.510,00 dan Beban Barang Pakai Habis -LO sebesar Rp23.284.454.574,00, terdapat selisih sebesar Rp37.155.064,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Belanja Barang Pakai Habis LRA	PIUTANG TA 2024	PENYETORAN PIUTANG TA 2021 (tambahkan kolom bila ada penyetoran piutang tahun lainnya)	Belanja Barang Pakai Habis TA 2024	Belanja Barang Pakai Habis TA 2023	Belanja Barang Pakai Habis LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6+7
Retribusi Jasa Umum							
1	Belanja Barang Pakai Habis	23.247.299.510,00	-	-	94.497.036,00	131.652.100,00	23.284.454.574,00
JUMLAH		19.620.000,00	-	-	1.139.178,08	1.148.688,52	19.629.510,44
TOTAL		19.620.000,00	-	-	1.139.178,08	1.148.688,52	19.629.510,44

5.2.2.3. Beban Jasa

Tahun 2024
Rp26.746.290.242,95

Tahun 2023
Rp30.732.670.288,20

Tabel 5.2.2.3 Kenaikan/Penurunan Beban Jasa-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	24.543.518.769,00	27.662.670.302,00	-3.119.151.533	-11,28
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	544.654.218,95	677.127.575,20	-132.473.356	-19,56
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	186.803.940,00	68.806.200,00	117.997.740	171,49
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.452.057.220,00	2.003.400.000,00	-551.342.780	-27,52
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	491.989,00	489.961,00	2.028	0,41
6	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	18.764.106,00	18.176.250,00	587.856	3,23
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	302.000.000,00	-302.000.000	-100,00
Jumlah		26.746.290.242,95	30.732.670.288,20	-3.986.380.045	-12,97

Sumber: ...

Belanja Jasa Kantor -LRA sebesar Rp24.659.884.184,00 dan Beban Jasa Kantor -LO sebesar Rp24.543.518.769,00, terdapat selisih sebesar Rp116.365.415,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Beban Jasa Kantor LRA	PIUTANG TA 2024	PENYETORAN PIUTANG TA 2021 (tambahkan kolom bila ada penyetoran piutang tahun lainnya)	Beban Jasa Kantor TA 2024	Beban Jasa Kantor TA 2023	Beban Jasa Kantor LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6+7
Beban							-
1	Beban Jasa Kantor	24.659.884.184,00	-	-	247.937.372,00	368.070.287,00	24.543.518.769,00
	JUMLAH	24.659.884.184,00	-	-	247.937.372,00	368.070.287,00	24.543.518.769,00
	TOTAL	24.659.884.184,00	-	-	247.937.372,00	368.070.287,00	24.543.518.769,00

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi -LRA sebesar Rp650.763.974,00 dan Beban Iuran Jaminan/Asuransi -LO sebesar Rp544.654.218,95, terdapat selisih sebesar Rp106.109.755,05, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi LRA	PIUTANG TA 2024	PENYETORAN PIUTANG TA 2021 (tambahkan kolom bila ada penyetoran piutang tahun lainnya)	Beban Dibayar Dimuka TA 2024	Beban Dibayar Dimuka TA 2023	Beban Iuran Jaminan/Asuransi LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6+7
Beban							-
1	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	650.763.974,00	-	-	269.579.963,97	163.470.208,92	544.654.218,95
	JUMLAH	650.763.974,00	-	-	269.579.963,97	163.470.208,92	544.654.218,95
	TOTAL	650.763.974,00	-	-	269.579.963,97	163.470.208,92	544.654.218,95

5.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Tahun 2024
Rp4.542.306.912,00

Tahun 2023
Rp5.971.312.977,00

Tabel 5.2.2.4 Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.254.474.931,00	3.278.818.942,00	-24.344.011	-0,74
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	963.667.581,00	2.341.326.110,00	-1.377.658.529	-58,84
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	324.164.400,00	351.167.925,00	-27.003.525	-7,69
Jumlah		4.542.306.912,00	5.971.312.977,00	-1.429.006.065	-23,93

Sumber: ...

5.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2024
Rp47.077.324.811,00

Tahun 2023
Rp54.938.083.417,00

Tabel 5.2.2.5 Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	47.077.324.811,00	51.719.189.804,00	-4.641.864.993	-8,98
2	Beban perjalanan dinas luar negeri	-	3.218.893.613,00	-3.218.893.613	-100
	Jumlah	47.077.324.811,00	54.938.083.417,00	-7.860.758.606	-14,31

Sumber: ...

5.2.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024
Rp11.126.749.727,54

Tahun 2023
Rp12.619.743.176,17

Tabel 5.2.2.6 Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.530.905.025,64	8.737.106.169,69	-1.206.201.144	-13,81
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.909.359.135,03	3.196.369.279,88	-287.010.145	-8,98
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	686.485.566,87	686.267.726,60	217.840	0,03
	Jumlah	11.126.749.727,54	12.619.743.176,17	-1.492.993.449	-11,83

Sumber: ...

5.2.3. Surplus/Defisit – LO

Tahun 2024
Rp182.721.018.241,05

Tahun 2023
Rp200.430.916.548,81

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.629.510,44 dan Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp182.740.647.751,49, Laporan Keuangan mengalami Defisit sebesar Rp182.721.018.241,05

5.3. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.3.1.	Ekuitas Awal	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp203.864.087.493,09	Rp211.837.957.539,58

Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp203.864.087.493,09 Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca (*Audited*).

5.3.2.	Surplus/Defisit – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp182.721.018.241,05	Rp200.430.916.548,81

Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp182.721.018.241,05 Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

5.3.3. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

Tabel 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	Rp.	(0,47)	0,47
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	Rp.	5.238.879.709,76	211.270.667,85
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	Rp	(7.057.308.991,00)	0,00
Jumlah	Rp.	(1.818.429.281,71)	211.270.668,32

Sumber:.....

5.4. Neraca

5.4.1. Aset Lancar

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2024 terdiri dari :

Tabel 5.4.1 Rincian Aset Lancar

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	-	-
Beban Dibayar Dimuka	Rp.	269.579.963,97	163.470.208,92
Persediaan	Rp.	207.950.825,00	245.105.889,00
Total Aset Lancar	Rp.	477.530.788,97	408.576.097,92

Sumber:

5.4.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2024 Rp-	Tahun 2023 Rp-
----------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2024 dan belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh sebesar Rp- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.		-	-
Jumlah		-	-

Sumber:

5.4.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024 Rp-	Tahun 2023 Rp-
----------	------------------------------	-------------------	-------------------

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan sebesar Rp-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.		-	-
Jumlah		-	-

Sumber:

5.4.1.3.	Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2024 Rp269.579.963,97	Tahun 2023 Rp163.470.208,92
----------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp269.579.963,97 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.3.1.	Asuransi Dibayar Dimuka	Tahun 2024 Rp269.579.963,97	Tahun 2023 Rp163.470.208,92
------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Asuransi Dibayar Dimuka merupakan pembayaran Asuransi yang telah dilakukan Pemerintah Aceh namun prestasi pada akhir Tahun Anggaran 2024 belum diserahkan. Asuransi dibayar

dimuka atas Belanja Premi Asuransi Mobil Pimpinan DPRA sebesar Rp78.288.850,00 periode 23 Desember 2024 s.d 22 Desember 2025 sesuai perjanjian sewa-menyewa Nomor : 027/226/SPK/KPA.1/P2/2024 dan Asuransi dibayar dimuka atas Belanja Premi Asuransi Kendaraan Pool Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 6 (Enam) sebesar Rp522.413.750,00 periode 16 Mei 2024 s.d 15 Mei 2025 sesuai perjanjian sewa-menyewa Nomor : 027/001/SP/KPA.1/P2/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.1 Rincian Asuransi Dibayar Dimuka

No	Uraian	Nomor Kontrak	Periode sesuai Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Prestasi yang telah dinikmati di tahun 2024 (Rp)	Prestasi yang belum dinikmati Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7= 5-6
	Asuransi dibayar dimuka atas Belanja Premi Asuransi Mobil Pimpinan DPRA	027/226/SPK/KPA.1/P2/2024	23 Desember 2024 s.d 22 Desember 2025	Rp78.288.850,00	Rp1.930.410,00	Rp76.358.440,00
	Asuransi dibayar dimuka atas Belanja Premi Asuransi Kendaraan Pool Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 6 (Enam)	027/001/SP/KPA.1/P2/2024	16 Mei 2024 s.d 15 Mei 2025	Rp522.413.750,00	Rp329.192.226,03	Rp193.221.523,97
	Jumlah			Rp 584.837.267,00	Rp 421.367.058,08	Rp 269.579.963,97

Sumber:

5.4.1.4.	Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp207.950.825,00	Rp245.105.889,00

Persediaan sebesar Rp207.950.825,00 terdiri dari Barang Pakai Habis yang masih tersisa per 31 Desember 2024 sebesar Rp207.950.825,00 Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp- dan Barang Bekas Pakai sebesar Rp- dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.5.	Barang Pakai Habis	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp207.950.825,00	Rp245.105.889,00

1. Bahan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	81.149.325,00
2	Bahan Lainnya	0,00
	Jumlah	81.149.325,00

2. Suku cadang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.976.000,00
	Jumlah	5.976.000,00

3. Alat/bahan untuk kegiatan kantor

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	60.833.150,00
2	Bahan Cetak	38.405.000,00
3	Alat Listrik	8.618.000,00
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.969.350,00
Jumlah		120.825.500,00

4. Obat-obatan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Obat-obatan Lainnya	0,00
Jumlah		0,00

5.4.2. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Tetap	Rp. 192.144.472.375,44	200.457.670.439,69
Aset Lainnya	Rp. 789.942.940,00	3.367.059.931,00
Total Aset Tidak Lancar	Rp. 192.934.415.315,44	203.824.730.370,69

5.4.2.1. Aset Tetap

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp192.144.472.375,44	Rp200.457.670.439,69

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.2.1 Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2023	Realisasi Belanja Modal TA 2024	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2024 setelah penyesuaian
1	Tanah	72.524.678.500,00	-	-	72.524.678.500,00
2	Peralatan dan Mesin	106.543.431.633,69	1.513.395.600,00	(4.480.192.000,47)	103.576.635.233,22
3	Gedung dan Bangunan	144.398.058.562,00	541.468.354,00	(141.833.163,00)	144.797.693.753,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.948.542.089,00	-	-	17.948.542.089,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.241.747.525,00	-	141.833.163,00	3.383.580.688,00
7	Akumulasi Penyusutan	(144.198.787.870,00)	-	(5.887.870.017,78)	(150.086.657.887,78)
	JUMLAH	200.457.670.439,69	2.054.863.954,00	(10.368.062.018,25)	192.144.472.375,44

Sumber:.....

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Tanah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp72.524.678.500,00	Rp72.524.678.500,00

Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	72.524.678.500,00	72.524.678.500,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari: - Belanja modal tahun 2024 - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD • Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	72.524.678.500,0	72.524.678.500,00

Sumber:.....

5.4.2.1.2. Peralatan dan Mesin	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp103.576.635.233,22	Rp106.543.431.633,69

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1. Alat Besar

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Alat Besar per 31 Desember 2024 dan 2023.	3.787.992.750,00	3.976.525.950,47

Alat Besar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	3.976.525.950,47	3.935.785.950,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Besar terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		40.740.000,00
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		0,47
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Besar terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya	188.533.200,00	
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.787.992.750,00	3.976.525.950,47

Terdapat pengurangan nilai aset tetap Alat Besar sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 188.533.200,00 yang dikarenakan Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp188.533.200,00

2. Alat Angkutan

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Alat Angkutan per 31 Desember 2024 dan 2023.	29.520.235.960,00	29.520.235.960,00

Alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	29.520.235.960,00	29.520.235.960,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Angkutan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Angkutan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	29.520.235.960,0	29.520.235.960,00

Sumber:.....

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2024 dan 2023.	78.168.900,00	78.168.900,00

Alat Bengkel dan Ukur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	78.168.900,00	78.168.900,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Bengkel terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Bengkel terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	78.168.900,00	78.168.900,00

Sumber:.....

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 dan 2023.	55.667.858.781,00	58.669.882.881,39

Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	58.669.882.881,39	56.697.444.116,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat kantor dan Rumah terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024	569.645.600,00	1.723.751.457,00
- Hibah		456.000.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		0,39
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat kantor dan Rumah terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	32.000.000,00	144.290.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	3.539.669.700,00	
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		63.022.692,00
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi	0,39	
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	55.667.858.781,00	58.669.882.881,39

Sumber:.....

Terdapat pengurangan nilai aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp3.002.024.100,39 yang dikarenakan:

1. Penambahan nilai aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga dikarenakan:
 - a. Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp569.645.600,00
2. Pengurangan nilai aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga dikarenakan:
 - a. Reklasifikasi antar Aset Tetap tahun 2024 yaitu reklas ke Alat Studio sebesar Rp32.000.000,00
 - b. Reklasifikasi antar Aset Lainnya yaitu reklas ke KIB B RB sebesar Rp3.539.669.700,00
 - c. Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem agar sama dengan KIB sistem sebesar Rp0,39

5. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2024 dan 2023.	3.531.664.100,00	3.427.864.100,00

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	3.427.864.100,00	3.362.564.100,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024	71.800.000,00	517.950.000,00
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	32.000.000,00	65.300.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		456.000.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		61.950.000,00
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.531.664.100,00	3.427.864.100,00

Sumber:.....

Terdapat penambahan nilai aset tetap Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp103.800.000,00 yang dikarenakan Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp71.800.000,00 dan Reklasifikasi antar Aset Tetap tahun 2024 yaitu reklas dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp32.000.000,00

6. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023.	1.843.615.289,22	1.843.615.289,22

Alat-alat Kedokteran dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	1.843.615.289,22	1.842.596.289,22
• Penambahan nilai aset tetap Alat Kedokteran terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2023		1.019.000,00
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Kedokteran terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.843.615.289,22	1.843.615.289,22

Sumber:.....

7. Alat Laboratorium

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 dan 2023.	5.058.000,00	5.058.000,00

Alat Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	5.058.000,00	5.058.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Laboratorium terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Laboratorium terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	5.058.000,00	5.058.000,00

Sumber:.....

8. Komputer

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo alat Komputer Petunjuk per 31 Desember 2024 dan 2023.	8.974.419.255,00	8.854.458.355,08

Alat Komputer Petunjuk dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	8.854.458.355,08	8.658.897.355,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Komputer terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024	871.950.000,00	208.861.000,00
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		0,08
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	95.130.000,00	95.130.000,00

Sumber:.....

10. Rambu-rambu

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan Alat Rambu-rambu per 31 Desember 2024 dan 2023.	72.492.198,00	72.492.198,00

Alat Rambu-rambu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	72.492.198,00	72.492.198,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Rambu-rambu terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Alat Rambu-rambu terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	72.492.198,00	72.492.198,00

Sumber:.....

5.4.2.1.3. Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp144.797.693.753,00	Rp144.398.058.562,00

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Bangunan Gedung

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 2023.	139.209.964.700,00	138.810.329.509,00

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	138.810.329.509,00	136.892.592.278,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan		
Gedung terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024	541.468.354,00	2.097.016.349,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		92.290.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		67.569.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	141.833.163,00	339.138.118,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	139.209.964.700,00	138.810.329.509,00

Sumber:.....

Terdapat penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp399.635.191,00 yang dikarenakan:

1. Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung dikarenakan:
 - a. Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp541.468.354,00
2. Pengurangan nilai aset tetap Bangunan Gedung dikarenakan:
 - a. Reklasifikasi antar Aset Tetap 2024 sebesar Rp141.833.163,00

2. Bangunan Monumen

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Monumen per 31 Desember 2024 dan 2023.	395.540.000,00	395.540.000,00

Bangunan Monumen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	395.540.000,00	395.540.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Belanja Modal BLUD • Pengurangan aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	395.540.000,00	395.540.000,00

Sumber:.....

3. Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2024 dan 2023.	5.192.189.053,00	5.192.189.053,00

Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal • Penambahan nilai aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol terdiri dari: - Belanja modal tahun 2024 - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD • Pengurangan aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD	5.192.189.053,00	4.941.502.165,00
Saldo akhir setelah penyesuaian	5.192.189.053,00	5.192.189.053,00

Sumber:.....

5.4.2.1.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2024
Rp17.948.542.089,00

Tahun 2023
Rp17.948.542.089,00

1. Jalan dan Jembatan

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 dan 2023.	6.326.602.100,00	6.326.602.100,00

Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	6.326.602.100,00	6.326.602.100,00
• Penambahan nilai aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	6.326.602.100,00	6.326.602.100,00

Sumber:.....

2. Bangunan Air

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2024 dan 2023.	8.192.648.689,00	8.192.648.689,00

Bangunan Air (Irigasi) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	8.192.648.689,00	8.192.648.689,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Air terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Bangunan Air terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	8.192.648.689,00	8.192.648.689,00

Sumber:.....

3. Instalasi

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023.	1.865.804.500,00	1.865.804.500,00

Instalasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	1.865.804.500,00	1.865.804.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari: - Belanja modal tahun 2024 - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Barang dan Jasa - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.865.804.500,00	1.865.804.500,00

Sumber:.....

4. Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023.	1.563.486.800,00	1.563.486.800,00

Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	1.563.486.800,00	1.563.486.800,00
• Penambahan nilai aset tetap Jaringan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
• Pengurangan aset tetap Jaringan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Beban Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi ke Persediaan		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Penyesuaian nilai akibat revaluasi		
- Extracomptable		
- Penghapusan		
- Utang Belanja Modal		
- Belanja Modal BLUD		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.563.486.800,00	1.563.486.800,00

Sumber:.....

5.4.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp3.383.580.688,00	Rp3.241.747.525,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Bahan Perpustakaan

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Merupakan saldo Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2024 dan 2023.	3.383.580.688,00	3.241.747.525,00

Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Saldo Awal	3.241.747.525,00	3.220.865.295,00
• Penambahan nilai aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2024		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	141.833.163,00	118.096.230,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya		
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		
- Barang dan Jasa		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi dari KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD - Pengurangan aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari: - Hibah - Reklasifikasi antar Aset Tetap - Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya - Reklasifikasi antar Aset Lainnya - Beban Barang dan Jasa - Reklasifikasi ke Persediaan - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian Nilai Akibat dari Rekonsiliasi - Reklasifikasi ke KDP - Penyesuaian nilai akibat revaluasi - Extracomptable - Penghapusan - Utang Belanja Modal - Belanja Modal BLUD		97.214.000,00
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.383.580.688,00	3.241.747.525,00

Terdapat penambahan nilai aset tetap lainnya Bahan Perpustakaan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp141.833.163,00 yang dikarenakan Reklasifikasi antar Aset Tetap yaitu reklas dari bangunan gedung

5.4.2.1.6. Akumulasi Penyusutan

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp(150.086.657.887,78) Rp(144.198.787.870,00)

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.6 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Peralatan dan Mesin	(95.045.813.827,53)	(91.907.672.801,89)
- Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(3.723.607.571,43)	(3.801.001.878,58)
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(26.313.417.959,84)	(24.330.847.263,84)
- Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(74.780.900,00)	(70.381.120,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(52.063.117.699,68)	(51.587.673.835,48)
- Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2.814.968.588,00)	(2.274.253.768,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.816.378.905,36)	(1.785.850.121,52)
- Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(5.058.000,00)	(5.058.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Komputer	(8.066.862.005,22)	(7.884.984.616,47)
- Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(95.130.000,00)	(95.130.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(72.492.198,00)	(72.492.198,00)
- Bangunan dan Gedung	(46.718.419.063,48)	(44.649.461.096,72)
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(45.271.114.372,23)	(43.303.835.077,64)
- Akumulasi Penyusutan Monumen	(94.929.600,00)	(87.018.800,00)
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(1.352.375.091,25)	(1.258.607.219,08)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
- Jalan, Jaringan Dan Irigasi	(8.322.424.996,77)	(7.641.653.971,39)
- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4.447.333.078,78)	(4.038.072.200,00)
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(2.741.369.708,65)	(2.561.910.848,80)
- Akumulasi Penyusutan Instalasi	(585.425.294,35)	(532.948.898,85)
- Akumulasi Penyusutan Jaringan	(548.296.914,99)	(508.722.023,74)
Saldo akhir setelah penyesuaian	(150.086.657.887,78)	(144.198.787.870,00)

Sumber:.....

5.4.2.2.	Aset Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp789.942.940,00	Rp3.367.059.931,00

Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp789.942.940,00 terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain sebagai berikut:

5.4.2.2.1.	Aset Tak Berwujud	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp273.281.000,00	Rp273.281.000,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Dalam hal ini aset tidak berwujud pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berupa Software sebesar Rp 273.281.000,00

5.4.2.2.2.	Aset Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp789.942.940,00	Rp3.367.059.931,00

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset tetap yang tidak dapat diukur secara andal juga direklasifikan sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp789.942.940,00 terdiri dari:

- Aset Rusak Berat/Usang

Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp225.747.900,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Aset Rusak Berat/Usang terdiri dari:

Aset Rusak Berat/Usang	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp7.283.056.891,00	Rp2.802.864.891,00

Akumulasi Penyusutan Rusak Berat	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp(7.057.308.991,00)	Rp0
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp564.195.040,00

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional terdiri dari:

Aset Tetap dalam Penelusuran/Hilang	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp564.195.040,00	Rp564.195.040,00

Aset Lain-lain akan dihibahkan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0	Rp17.139.100,00

Aset Lain-lain akan dihibahkan dinilai 0 karena telah dihibahkan ke Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Montasik, Yayasan SOS Children’s Villages Desa Taruna dan Dayah Darul Qur’an Aceh berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 000.2.3.2/143/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Yaitu 48 Unit (Peralatan dan Mesin) Rp.17.139.100 Intrakomtabel

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0	Rp(17.139.100,00)

5.1.1.1.1. Akumulasi Amortisasi Aset	Tahun 2024	Tahun 2023
Tidak Berwujud	Rp (273.281.000,00)	Rp (273.281.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan Akumulasi Amortisasi dari Software sebesar Rp (273.281.000,00) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.3 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2021	Nilai Buku Tahun 2021
SOFTWARE						
1	Software/ Program Sistem Informasi Kepustakaan pada Sekretariat DPRA	2011	4 tahun	59.884.000,00	59.884.000,00	-
2	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Kepustakaan	2013	4 tahun	19.800.000,00	19.800.000,00	-
3	Aplikasi Pengendalian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	2013	4 tahun	40.000.000,00	40.000.000,00	-
4	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi	2013	4 tahun	46.475.000,00	46.475.000,00	-
5	Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan Record Center	2013	4 tahun	59.772.000,00	59.772.000,00	-
6	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Perpustakaan	2015	4 tahun	19.200.000,00	19.200.000,00	-
7	Software Database Kearsipan	2017	4 tahun	7.950.000,00	7.950.000,00	-
8	Windows Server	2014	4 tahun	19.000.000,00	19.000.000,00	-
9	Antivirus 3 Client	2014	4 tahun	400.000,00	400.000,00	-
10	Antivirus 3 PC	2014	4 tahun	800.000,00	800.000,00	-
Jumlah				273.281.000,00	273.281.000,00	-

Sumber:.....

5.1.1.1.2. Aset Ekstracomptable

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp1.446.352.027,00

Rp1.521.592.027,00

Aset Ekstracomptable adalah pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal sebesar Rp1.446.352.027,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2.4 Rincian Aset Ekstracomptable

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	100.617.775,00	100.617.775,00
2	Gedung Dan Bangunan	437.547.650,00	437.547.650,00
3	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	828.478.000,00	828.478.000,00
4	Aset Lainnya	79.708.602,00	154.948.602,00
Jumlah		1.446.352.027,00	1.521.592.027,00

Sumber:.....

Aset Ekstracomptable berkurang sebesar Rp75.240.000,00 yaitu 304 Unit Aset Lainnya berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 000.2.3.2/143/2024 Tanggal 29 Februari 2024 .

5.1.2. Kewajiban

Tahun 2024

Tahun 2023

Rp252.844.050,08

Rp369.218.975,52

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban Pemerintah Aceh yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp252.844.050,08 Terdiri dari:

1. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.139.178,08

Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III sebesar Rp1.139.178,08

NO	Uraian	No & Tgl Kontrak	Saldo Awal	Bertambah (Kredit)	Berkurang (Debet)	Saldo Unaudited 2024
1.	Pendapatan atas Sewa Menyewa Penempatan ATM antara Sekretariat DPRA dengan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama dengan nilai kontrak Rp4.620.000,00 Periode 01 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025	Nomor : 100.3.7.1/485/SPK/IV/2024 dan Nomor : 060/SPK/KCU.01/IV/2024 Tanggal 01 April 2024	Rp1.148.688,52	Rp1.139.178,08	Rp1.148.688,52	Rp1.139.178,08

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp251.704.872,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp241.650,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp60.856.160,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp190.607.062,00

5.1.3.	Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp193.159.102.054,33	Rp203.864.087.493,09

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp193.159.102.054,33

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terletak di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (23121). Telepon/Fax. (0651) 21638 ; email : dpraceh@gmail.com.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, merupakan lembaga struktural yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang saat ini dijabat oleh Bapak Suhaimi, SH, MH secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRA mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan
- e. pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan Alat-alat kelengkapan DPRA.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 96 tahun 2018, terdiri dari 4 bagian dan 12 sub bagian yang masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA.

- a. Bagian Umum, terdiri dari :
 - Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Subbagian Rumah Tangga
 - Subbagian Perlengkapan
- b. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan & Penganggaran
 - Subbagian Verifikasi
 - Subbagian Akuntansi & Pelaporan
- c. Bagian Persidangan & Perundang-undangan, terdiri dari :
 - Subbagian Kajian Perundang-undangan
 - Subbagian Persidangan & Risalah
 - Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - Subbagian Fasilitas Penganggaran
 - Subbagian Fasilitas Pengawasan
 - Subbagian Kerjasama & Aspirasi

BAB VII

PENUTUP

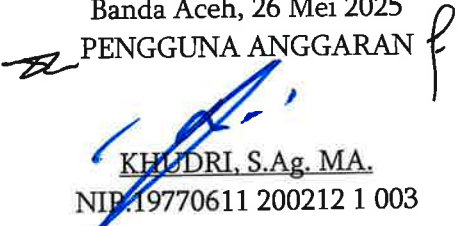
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah Aceh, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, 26 Mei 2025

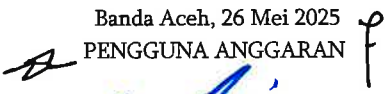
PENGGUNA ANGGARAN


KHUDRI, S.Ag. MA.

NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	-	-	-	-	
		TOTAL (1 s.d 4)	-	-	
		TOTAL BELANJA DAERAH (APBA)			
		RASIO TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH (%)	-	-	

Banda Aceh, 26 Mei 2025
PENGUNA ANGGARAN

KHUDRI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TA 2024

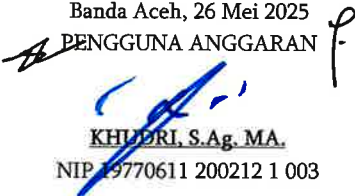
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD										Jumlah		
			Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Banda Aceh, 26 Mei 2025
 KH. DOKI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp)		%
			ANGGARAN P-APBA (Rp)	REALISASI (Rp)	
1.	BELANJA PADA SKPA				
	a.	Program			
	a.1	Kegiatan	-	-	
	a.1.1	Sub Kegiatan			
	TOTAL (a+b+c)				

Sumber: P RKPA Tahun 2024 (Aplikasi SIPD)

Banda Aceh, 26 Mei 2025
PENGUNA ANGGARAN

KHULDI, S.Ag. MA.
NIP 19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023	MUTASI		SALDO AKHIR 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.148.688,52		9.510,44	1.139.178,08
	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	1.148.688,52	-	9.510,44	1.139.178,08
2	Utang Belanja	368.070.287,00	46.185,00	116.411.600,00	251.704.872,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	225.285,00	16.365,00	-	241.650,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	60.826.340,00	29.820,00	-	60.856.160,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	307.018.662,00	-	116.411.600,00	190.607.062,00
	TOTAL	369.218.975,52	46.185,00	116.421.110,44	252.844.050,08

Banda Aceh, 26 Mei 2025

PENGGUNA ANGGARAN 


KHUPRI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
I	BELANJA OPERASI	106.038.361.703,00	53.019.180.851,50	50.917.848.323,00	96,04	
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	106.038.361.703,00	53.019.180.851,50	50.917.848.323,00	96,04	
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	-	-	-	-	
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	-	-	-	-	
II	BELANJA MODAL	2.057.970.394,00	514.492.598,50	513.715.988,50	99,85	
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.513.595.600,00	378.398.900,00	378.348.900,00	99,99	
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	544.374.794,00	136.093.698,50	135.367.088,50	99,47	
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
	TOTAL (I+II)	108.096.332.097,00	53.533.673.450,00	51.431.564.311,50	96,07	

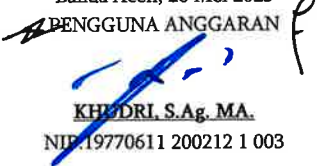
BANDA ACEH, 26 Mei 2025

 PENGUNA ANGGARAN

KHUDRI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
KESEHATAN TA 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada SKPA			
	1) Belanja Operasi:	-	-	-
	Belanja pegawai;	-	-	-
	Belanja barang dan jasa;	-	-	-
	Belanja hibah;	-	-	-
	Belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal	-	-	-
	b. Belanja diluar SKPA yang menunjang pendidikan dan/atau kesehatan, antara lain:			
	1) Belanja Transfer:	-	-	-
	Belanja bantuan keuangan...	-	-	-
	2) Sub Kegiatan... dan SKPA...	-	-	-
	dst...	-	-	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan dan/atau Kesehatan (a+b)	-	-	-
3.	Total Belanja Daerah	-	-	-
	Rasio anggaran pendidikan dan/atau kesehatan (2/3) x 100%	-	-	-

Banda Aceh, 26 Mei 2025
PENGGUNA ANGGARAN

KHIDRI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN MANDATORY SPENDING-BIDANG INFRASTRUKTUR

PELAYANAN PUBLIK TA 2024

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA KAB/KOTA

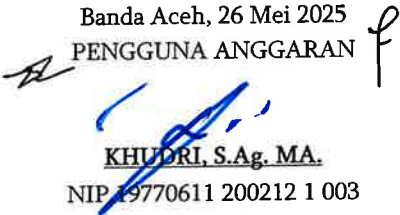
No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Penerimaan	-	-	-
	Dana Transfer Umum			
	a) DBH CHT	-	-	-
	b) DBH DR	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-
2.	Pengurang	-	-	-
	a) DBH CHT	-	-	-
	b) DBH DR	-	-	-
	c) ADD	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	-	-	-

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal	-	-	-
	1) tanah;	-	-	-
	2) peralatan dan mesin;	-	-	-
	3) bangunan dan gedung;	-	-	-
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	-	-	-
	5) aset tetap lainnya;	-	-	-
	6) aset lainnya;	-	-	-
	b) Belanja Pemeliharaan	-	-	-
2.	a) Belanja Hibah;	-	-	-
	b) Belanja Bantuan Sosial;	-	-	-
	c) Belanja Bantuan Keuangan;	-	-	-
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	-	-	-
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	-	-	-

Banda Aceh, 26 Mei 2025

PENGGUNA ANGGARAN

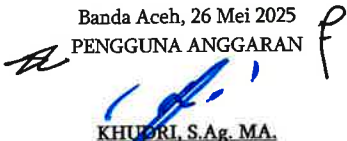


KHUDRI, S.Ag. MA.

NIP 19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TA 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran APBA-P (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
A	SPM Bidang Pendidikan			
1.		1.	1.	1.
		2.	2.	2.
Total			-	-
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan			-	-
B	SPM Bidang Kesehatan		-	-
1.		1.	1.	1.
		2.	2.	2.
Total			-	-
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan			-	-
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.		1.	1.	1.
		2.	2.	2.
Total			-	-
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			-	-
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1.		1.	1.	1.
		2.	2.	2.
Total			-	-
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			-	-
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.		1.	1.	1.
		2.	2.	2.
Total			-	-
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	-
F	SPM Bidang Sosial			
1.		1.	1.	1.
		2.	2.	2.
Total			-	-
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial			-	-

Banda Aceh, 26 Mei 2025
PENGUNA ANGGARAN

KHUORLI S. Ag. MA.
NIP. 19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

PENTABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PER SUMBER DANA

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening (Sub Rincian)	Uraian Program	Anggaran			Total Anggaran	Realisasi			Total Realisasi	%	Penjelasan Realisasi dibawah 80%
		PAA	DTU-DBH	DTU-DAU		PAA	DTU-DBH	DTU-DAU			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10/6*100	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	144.131.939.023	-	34.545.643.460	178.677.582.483	139.790.352.647	-	34.015.902.338	173.854.082.085	97,30	
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	144.131.939.023	-	34.545.643.460	178.677.582.483	139.790.352.647	-	34.015.902.338	173.854.082.085	97,30	
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.410.987.466	-	34.545.643.460	104.956.630.926	69.244.683.322	-	34.015.902.338	103.308.412.760	98,43	
4.02.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.433.092	-	-	247.433.092	247.845.992	-	-	246.771.092	99,73	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.313.264	-	-	104.313.264	104.203.264	-	-	104.203.264	99,89	
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	105.534.728	-	-	105.534.728	105.005.728	-	-	105.005.728	99,50	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.251.100	-	-	22.251.100	23.837.900	-	-	22.228.100	99,90	
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.334.000	-	-	15.334.000	14.799.100	-	-	15.334.000	100,00	
4.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.423.186.739	-	9.495.902.338	20.919.089.077	11.413.256.275	-	9.495.902.338	20.909.158.613	99,95	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.263.149.764	-	9.495.902.338	18.759.052.102	9.263.149.764	-	9.495.902.338	18.759.052.102	100,00	
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.015.567.375	-	-	2.015.567.375	2.015.567.375	-	-	2.015.567.375	100,00	
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.338.000	-	-	103.338.000	93.407.536	-	-	93.407.536	90,39	
4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	31.141.800	-	-	31.141.800	31.141.800	-	-	31.141.800	100,00	
4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.140.000	-	-	2.140.000	2.140.000	-	-	2.140.000	100,00	
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.849.800	-	-	7.849.800	7.849.800	-	-	7.849.800	100,00	
4.02.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	209.232.000	-	-	209.232.000	108.577.960	-	-	108.577.960	51,89	
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	209.232.000	-	-	209.232.000	108.577.960	-	-	108.577.960	51,89	
4.02.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	340.142.000	-	-	340.142.000	269.186.022	-	-	269.186.022	79,14	
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.950.000	-	-	70.950.000	70.096.500	-	-	70.096.500	98,80	
4.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	186.902.000	-	-	186.902.000	181.667.122	-	-	181.667.122	97,20	
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.290.000	-	-	82.290.000	17.422.400	-	-	17.422.400	21,17	
4.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.659.377.431	-	-	2.659.377.431	2.424.736.465	-	-	2.473.638.465	93,02	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.729.627.797	-	-	1.729.627.797	1.575.594.015	-	-	1.575.594.015	91,09	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.110.634	-	-	157.110.634	137.246.250	-	-	137.246.250	87,36	
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	280.884.000	-	-	280.884.000	280.884.000	-	-	280.884.000	100,00	
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	290.000.000	-	-	290.000.000	240.623.000	-	-	289.525.000	99,84	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.755.000	-	-	201.755.000	190.389.200	-	-	190.389.200	94,37	
4.02.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.797.267.200	-	-	1.797.267.200	1.784.267.200	-	-	1.784.267.200	99,28	
4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.797.267.200	-	-	1.797.267.200	1.784.267.200	-	-	1.784.267.200	99,28	
4.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.624.434.378	-	-	15.624.434.378	15.106.968.677	-	-	15.106.968.677	96,69	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.060.325.279	-	-	5.060.325.279	4.953.189.768	-	-	4.953.189.768	97,88	
4.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.557.220	-	-	342.557.220	244.977.013	-	-	244.977.013	71,51	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.221.551.879	-	-	10.221.551.879	9.908.801.896	-	-	9.908.801.896	96,94	
4.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.704.220.490	-	-	4.704.220.490	4.592.068.572	-	-	4.592.068.572	97,62	
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.628.850	-	-	287.628.850	287.454.885	-	-	287.454.885	99,94	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.440.059.306	-	-	2.440.059.306	2.354.745.266	-	-	2.354.745.266	96,50	

Kode Rekening (Sub Rincian)	Uraian Program	Anggaran			Total Anggaran	Realisasi			Total Realisasi	%	Penjelasan Realisasi dibawah 80%
		PAA	DTU-DBH	DTU-DAU		PAA	DTU-DBH	DTU-DAU			
1	2	3	4	5	6-3+4+5	7	8	9	10-7+8+9	11=10/6*100	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	772.157.534	-	-	772.157.534	771.662.531	-	-	771.662.531	99,94	
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.204.374.800	-	-	1.204.374.800	1.178.205.890	-	-	1.178.205.890	97,83	
4.02.01.1.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.457.164.962	-	25.049.741.122	53.506.906.084	28.368.364.382	-	24.570.000.000	52.888.364.382	98,84	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.877.951.162	-	25.049.741.122	50.927.692.284	25.789.963.382	-	24.520.000.000	50.309.963.382	98,79	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.385.891.000	-	-	2.385.891.000	2.385.891.000	-	-	2.385.891.000	100,00	
4.02.01.1.15.03	Peaksanaan Medical Check Up DPRD	193.322.800	-	-	193.322.800	192.510.000	-	-	192.510.000	99,58	
4.02.01.1.16.	Layanan Adminstrasi DPRD	4.948.529.174	-	-	4.948.529.174	4.929.411.777	-	-	4.929.411.777	99,61	
4.02.01.1.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD	68.480.000	-	-	68.480.000	67.730.000	-	-	67.730.000	98,90	
4.02.01.1.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	168.847.760	-	-	168.847.760	154.860.000	-	-	154.860.000	91,72	
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.711.201.414	-	-	4.711.201.414	4.706.821.777	-	-	4.706.821.777	99,91	
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	73.720.951.557	-	-	73.720.951.557	70.545.669.325	-	-	70.545.669.325	95,69	
4.02.02.1.01.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	10.699.172.137	-	-	10.699.172.137	10.480.037.329	-	-	10.480.037.329	97,95	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	233.858.000	-	-	233.858.000	217.888.708	-	-	217.888.708	93,17	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	8.612.988.081	-	-	8.612.988.081	8.504.172.514	-	-	8.504.172.514	98,74	
4.02.02.1.01.03	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	630.295.156	-	-	630.295.156	630.295.156	-	-	630.295.156	100,00	
4.02.02.1.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	375.000.000	-	-	375.000.000	375.000.000	-	-	375.000.000	100,00	
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	847.030.900	-	-	847.030.900	752.680.951	-	-	752.680.951	88,86	
4.02.02.1.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.305.189.950	-	-	1.305.189.950	1.256.624.727	-	-	1.256.624.727	96,28	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	91.434.600	-	-	91.434.600	91.033.000	-	-	91.033.000	99,56	
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.324.600	-	-	20.324.600	19.982.800	-	-	19.982.800	98,32	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1.046.360.600	-	-	1.046.360.600	998.800.017	-	-	998.800.017	95,45	
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	61.056.430	-	-	61.056.430	61.056.430	-	-	61.056.430	100,00	
4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	5.474.600	-	-	5.474.600	5.473.360	-	-	5.473.360	99,98	
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	80.539.120	-	-	80.539.120	80.279.120	-	-	80.279.120	99,68	
4.02.02.1.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.030.657.350	-	-	6.030.657.350	5.980.515.506	-	-	5.980.515.506	99,17	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	486.524.300	-	-	486.524.300	481.963.300	-	-	481.963.300	99,06	
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	515.920.300	-	-	515.920.300	512.166.200	-	-	512.166.200	99,27	
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	840.668.600	-	-	840.668.600	816.893.900	-	-	816.893.900	97,17	
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	433.412.300	-	-	433.412.300	425.657.600	-	-	425.657.600	98,21	
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	433.412.300	-	-	433.412.300	429.562.800	-	-	429.562.800	99,11	
4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	579.252.000	-	-	579.252.000	577.040.860	-	-	577.040.860	99,62	
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.209.915.000	-	-	2.209.915.000	2.206.208.780	-	-	2.206.208.780	99,83	
4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	531.552.550	-	-	531.552.550	531.022.066	-	-	531.022.066	99,90	
4.02.02.1.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.426.549.117	-	-	10.426.549.117	10.223.734.047	-	-	10.223.734.047	98,05	
4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	2.191.981.002	-	-	2.191.981.002	2.139.980.979	-	-	2.139.980.979	97,63	
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.302.324.000	-	-	1.302.324.000	1.284.700.985	-	-	1.284.700.985	98,65	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.544.000.000	-	-	1.544.000.000	1.448.000.000	-	-	1.448.000.000	93,78	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	355.700.000	-	-	355.700.000	344.000.000	-	-	344.000.000	96,71	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	690.005.000	-	-	690.005.000	687.787.980	-	-	687.787.980	99,68	
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.073.049.115	-	-	1.073.049.115	1.062.590.793	-	-	1.062.590.793	99,03	
4.02.02.1.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.269.490.000	-	-	3.269.490.000	3.256.673.310	-	-	3.256.673.310	99,61	
4.02.02.1.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	32.028.538.039	-	-	32.028.538.039	30.909.700.620	-	-	30.909.700.620	96,51	

Kode Rekening (Sub Rincian)	Uraian Program	Anggaran			Total Anggaran	Realisasi			Total Realisasi	%	Penjelasan Realisasi dibawah 80%
		PAA	DTU-DBH	DTU-DAU		PAA	DTU-DBH	DTU-DAU			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10/6*100	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.512.748.799	-	-	11.512.748.799	10.832.820.170	-	-	10.832.820.170	94,09	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	158.565.380	-	-	158.565.380	149.449.950	-	-	149.449.950	94,25	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	20.357.223.860	-	-	20.357.223.860	19.927.430.500	-	-	19.927.430.500	97,89	
4.02.02.1.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	600.058.300	-	-	600.058.300	451.575.250	-	-	451.575.250	75,26	
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	600.058.300	-	-	600.058.300	451.575.250	-	-	451.575.250	75,26	
4.02.02.1.1.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	28.834.920	-	-	28.834.920	21.085.000	-	-	21.085.000	73,12	
4.02.02.1.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	28.834.920	-	-	28.834.920	21.085.000	-	-	21.085.000	73,12	
4.02.02.1.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	12.601.951.744	-	-	12.601.951.744	11.222.396.846	-	-	11.222.396.846	89,05	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.990.065.608	-	-	3.990.065.608	3.045.036.204	-	-	3.045.036.204	76,32	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	115.396.098	-	-	115.396.098	115.396.098	-	-	115.396.098	100,00	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.668.527.280	-	-	1.668.527.280	1.586.822.120	-	-	1.586.822.120	95,10	
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.222.179.308	-	-	6.222.179.308	5.869.358.974	-	-	5.869.358.974	94,33	
4.02.02.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	605.783.450	-	-	605.783.450	605.783.450	-	-	605.783.450	100,00	
Jumlah		144.131.939.023	-	-	178.677.582.483	139.790.352.647	-	-	173.854.082.085	97,30	

Banda Aceh, 26 Mei 2025

PENGGUNA ANGGARAN

KHUSRI, S.Ag. MA.,
NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

REKONSILIASI KAS DAN BANK

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
a. Saldo Buku per 31 Desember 2023			
1) Saldo awal		1.041.502.074	
2) Penerimaan		40.896.541.576	
3) Pengeluaran		(41.938.043.650)	
	Saldo Buku		-
Koreksi Saldo Buku			
1.		-	-
Jumlah koreksi Saldo Buku			-
	Saldo Buku setelah koreksi		-
b. Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2023			
SET DPRA BP	010.01.02.402010-0	-	
SET DPRA BPP 1	010.01.02.402010-1	-	
SET DPRA BPP 2	010.01.02.402010-2	-	
SET DPRA BPP 3	010.01.02.402010-3	-	
Tunai		-	
	Saldo Kas dan Bank sebelum koreksi		-
Koreksi saldo kas dan bank :			
1.		-	-
Jumlah koreksi saldo kas dan bank			-
	Saldo Kas dan Bank setelah koreksi		-
Selisih antara Saldo buku dengan saldo kas dan bank			

Penjelasan Koreksi Saldo :

1.

Banda Aceh, 26 Mei 2025

PENGUNA ANGGARAN

KHIDRI, S.Ag., MA

NIP. 19770611 200212 1 003

ANGGARAN DAN REALISASI
DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2024*

SKPA : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NO.	Program/ Kegiatan	Kode Rekening	PAGU/ANGGARAN			REALISASI					SISA DAK	SISA PENDAMPING	SISA TOTAL
			DAK	PENDAMPING	TOTAL	DAK	PENDAMPING	TOTAL					
								Fisik (%)	Keuangan	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.	dst.												

BANDA ACEH, 26 Mei 2025
PENGUNA ANGGARAN


KHUDRI, S.Ag. MA.
NIP. 19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN / RUANG	ESELON				NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
					PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e									0
Golongan IV/d									0
Golongan IV/c									0
Golongan IV/b		1	3			1			5
Golongan IV/a				3				10	13
JUMLAH GOLONGAN IV	0	1	3	3	0	1	0	10	18
Golongan III/d				6				44	50
Golongan III/c				1				19	20
Golongan III/b								11	11
Golongan III/a								11	11
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	0	7	0	0	0	85	92
Golongan II/d								13	13
Golongan II/c								1	1
Golongan II/b								1	1
Golongan II/a									0
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Golongan I/d									0
Golongan I/c									0
Golongan I/b									0
Golongan I/a									0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	3	10	0	1	0	110	125

Banda Aceh, 26 Mei 2025
PENGUNA ANGGARAN


KHUDRI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

Daftar Rekapitulasi Jasa Konsultansi dan Kontrak Pekerjaan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Tahun Anggaran 2024
Januari s.d Desember 2024

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana/ Penyedia	Nomor Kontrak								Addendum		Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan		Sumber Dana	Nomor SP2D
			Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pekerjaan (Hari)	Nilai Kontrak			Nomor dan Tanggal SPMK	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal			
						Nilai Kontrak	Komposisi BLP (Biaya Langsung Personel)	Komposisi BNLP (Biaya Langsung Non Personel)								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Perencanaan Rehab Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRA	CV. PATI PLANNING GROUP	027/022/SP K/V/KPA1/P 1/2024	14 Mei 2024	45 (Empat puluh lima) Hari Kalender	97.588.563,00	71,67%	28,37%	027/066/SPMK/ V/KPA1/P1/2024	-	-	027/022/ BAST/VI/ KPA1/P1/ 2024	14 Juni 2024		0007629/LS BL/2024	
	Perencanaan Penyediaan Ruang Nursery	CV. FRAME DESIGN	027/051/SP K/VII/KPA1/ 2024	16 Juli 2024	15 (Lima Belas) Hari Kalender	9.823.500,00	52,54%	47,45%	027/066/SPMK/ VIII/KPA1/2024	-	-	027/051/ BAST/IX/ KPA1/20 24	29 Juli 2024		0010670/LS BL/2024	
	Perencanaan Rehab Plafon Dalam Gedung Utama Pada Kantor Sekretariat DPRA	CV. FOCUS CONSULTANT	027/060/SP K/VII/KPA1/ 2024	30 Juli 2024	15 (Lima Belas) Hari Kalender	30.348.232,00	62,51%	37,49%	027/060/SPMK/ VIII/KPA1/2024	-	-	027/060/ BAST/IX/ KPA1/20 24	30 Juli 2024		0011921/LS BL/2024	
	Perencanaan Rehab Ruang Klinik Asysyfa Sekretariat	CV. MENARA DESIGN CONSULTANT		28 November 2024	30 (Tiga puluh) Hari Kalender	44.244.600,00	56,04%	43,95%	027/104/SPMK/ XI/KPA1/2024	-	-	027/104/ BAST/XII /KPA1/20 24	20 Desember 2024		0027014/LS BL/2024	

Banda Aceh, 26 Mei 2025
 PENGGGUNA ANGGARAN
K. DRI. S. Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAFTAR PERSEDIAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SISA PERSEDIAAN TAHUN LALU (2023)	PENGADAAN TAHUN INI (2024)	PEMAKAIAN TAHUN INI (2024)	SISA PERSEDIAAN AKHIR TAHUN (2024)
1	2	3	4	5	6
1	Alat Tulis Kantor	35.309.250	295.578.450	270.054.550	60.833.150
2	Alat Listrik	7.465.500	13.680.000	12.527.500	8.618.000
3	Benda Pos	-	40.000.000	40.000.000	-
4	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.205.400	181.754.000	182.990.050	12.969.350
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	79.154.739	81.149.325	79.154.739	81.149.325
6	Bahan Cetak	101.793.000	62.494.100	125.882.100	38.405.000
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	6.308.000	-	332.000	5.976.000
8	Bahan Lainnya	870.000	-	870.000	-
9	Belanja Obat-obatan	-	6.268.170	6.268.170	-
	JUMLAH	245.105.889	680.924.045	718.079.109	207.950.825

Catatan :

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
- Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga, pita cukai dan leges, benda pos, bahan baku, barang dalam proses/ setengah jadi, tanah/ bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan/ tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset tetap untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai Persediaan, kecuali persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai

Banda Aceh, 26 Mei 2025

PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG

KH. DRI, S.Ag. MA.

NIP.19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Daftar Persediaan Barang Modal yang Belum Diserahkan Ke Kabupaten/Kota

No	Tahun Perolehan	Uraian	Sumber Dana	Jumlah Persediaan (barang yang belum diserahkan kepada pihak lain) (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			
JUMLAH					

Catatan :

1. Persediaan barang modal yang belum diserahkan merupakan pengadaan/perolehan modal kepada pihak lain yang belum ada BAST (berita acara serah terima), meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan, buku dll. Yang bersumber dari dana otsus, migas dan lainnya.
2. Sebab belum diserahkannya barang modal pada tahun berjalan dapat dijelaskan secara rinci pada kolom keterangan.

Banda Aceh, 26 Mei 2025

 PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG 


KHIDRI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG YANG DISERAHKAN TAHUN 2024

Nama SKPA : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Kode SKPA : 4.02.

URAIAN	Jumlah Persediaan Barang Yang diserahkan kepada masyarakat kab/kota Tahun 2023	Barang yang sudah diserahkan (Hibah)				Pengurangan Lainnya (Perencanaan, Penimbunan dan lain- lain)	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
		Pengadaan 2024	No BAST	Tanggal BAST	Nilai BAST		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 2+3-6-7
TANAH							
Tanah							
PERALATAN DAN MESIN							
a.. Alat Besar							
b. Alat Angkutan							
c. Alat Bengkel dan Ukur							
d. Alat Pertanian							
e. Alat Kantor dan Rumah Tangga							
f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar							
g. Alat Kedokteran dan Kesehatan							
h. Alat Laboratorium							
i. Alat Persenjataan							
j. Komputer							
k. Alat Eksplorasi							
l. Alat Pengeboran							
m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian							
n. Alat Bantu Eksplorasi							
o. Alat Keselamatan Kerja							
p. Alat Peraga							
q. Peralatan Proses/ Produksi							
r. Rambu - Rambu							
s. Peralatan Olah Raga							
GEDUNG DAN BANGUNAN							
a. Bangunan Gedung							

REKAPITULASI BARANG
SKPA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

No. Urur	Gol.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Aset s/d Tahun 2023	Penambahan Aset Tahun 2024	Penghapusan/ Hibah/ Pakai Habis / Jasa Tahun 2024	Ekstracomptable	Aset s.d Tahun 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9-5+6-7-8	10
1	01		TANAH	72.524.678.500,00	-	-	-	72.524.678.500,00	
		01	a. Tanah	72.524.678.500,00	-	-	-	72.524.678.500,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	106.543.431.633,69	1.545.395.600,00	4.512.192.000,47	-	103.576.635.233,22	
		02	a. Alat Besar	3.976.525.950,00	-	188.533.200,00	-	3.787.992.750,00	
		03	b. Alat Angkutan	29.520.235.960,00	-	-	-	29.520.235.960,00	
		04	c. Alat Bengkel dan Ukur	78.168.900,00	-	-	-	78.168.900,00	
		05	d. Alat Pertanian	-	-	-	-	-	
		06	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.669.882.881,39	569.645.600,00	3.571.669.700,39	-	55.667.858.781,00	
		07	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.427.864.100,00	103.800.000,00	-	-	3.531.664.100,00	
		08	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.843.615.289,22	-	-	-	1.843.615.289,22	
		09	h. Alat Laboratorium	5.058.000,00	-	-	-	5.058.000,00	
		10	i. Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	
		11	j. Komputer	8.854.458.355,08	871.950.000,00	751.989.100,08	-	8.974.419.255,00	
		12	k. Alat Eksplorasi	95.130.000,00	-	-	-	95.130.000,00	
		13	l. Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	
		14	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	-	
		15	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	
		1617	o. Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	
		18	p. Alat Peraga	-	-	-	-	-	
		19	q. Peralatan Proses/ Produksi	-	-	-	-	-	
		20	r. Rambu - Rambu	72.492.198,00	-	-	-	72.492.198,00	
		21	s. Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	144.398.058.562,00	541.468.354,00	141.833.163,00	-	144.797.693.753,00	
		11	a. Bangunan Gedung	138.810.329.509,00	541.468.354,00	141.833.163,00	-	139.209.964.700,00	
		12	b. Monumen	395.540.000,00	-	-	-	395.540.000,00	
		13	c. Bangunan Menara	-	-	-	-	-	
		14	d. Tugu Titik Kontrol / Pasti	5.192.189.053,00	-	-	-	5.192.189.053,00	
4	04		JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	17.948.542.089,00	-	-	-	17.948.542.089,00	
		15	a. Jalan dan Jembatan	6.326.602.100,00	-	-	-	6.326.602.100,00	
		16	b. Bangunan Air/Irigasi	8.192.648.689,00	-	-	-	8.192.648.689,00	
		17	c. Instalasi	1.865.804.500,00	-	-	-	1.865.804.500,00	
		18	d. Jaringan	1.563.486.800,00	-	-	-	1.563.486.800,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	3.241.747.525,00	141.833.163,00	-	-	3.383.580.688,00	
		19	a. Bahan Perpustakaan	3.241.747.525,00	141.833.163,00	-	-	3.383.580.688,00	
		20	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-	-	
		21	c. Hewan	-	-	-	-	-	
		22	d. Biota Perairan	-	-	-	-	-	
		23	e. Tanaman	-	-	-	-	-	
		24	f. Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	

No. Urur	Gol.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Aset s/d Tahun 2023	Penambahan Aset Tahun 2024	Penghapusan/ Hibah/ Pakai Habis / Jasa Tahun 2024	Ekstracomptable	Aset s.d Tahun 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9-5+6-7-8	10
		25	g. Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-	-	-	
6	06		KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	-	-	-	-	-	
		26	a. Konstruksi dalam Pekerjaan	-	-	-	-	-	
7	07		ASET LAINNYA	3.367.059.931,00	-	2.577.116.991,00	-	789.942.940,00	
		22	a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
		23	b. Aset Lain-lain	3.367.059.931,00	-	2.577.116.991,00	-	789.942.940,00	
		24	c. Aset Tak Berwujud	273.281.000,00	-	-	-	273.281.000,00	
		25	d. Amortisasi	(273.281.000,00)	-	-	-	(273.281.000,00)	
8	08		PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	(144.198.787.870,00)	-	-	-	(150.086.657.887,78)	
		26	a. Penyusutan Aset tetap	(144.198.787.870,00)	-5887870017,78	-	-	(150.086.657.887,78)	
		27	b. Penyusutan aset Lain-lain	-	-	-	-	-	
			J U M L A H	203.824.730.370,69	2.228.697.117,00	7.231.142.154,47	-	192.934.415.315,44	-

Mengetahui
PENGUNA BARANG

KHODRI, S.Ag. MA.
NIP.19770611 200212 1 003

Banda Aceh, 26 Mei 2025
PENGURUS BARANG PENGGUNA

YUSNANIAR, SE
NIP. 19810907 200604 2 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	Jumlah						JUMLAH AKUMULASI REALISASI s.d AKHIR TAHUN 2024	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBA TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN XXXX	REALISASI TAHUN XXXX	REALISASI TAHUN XXXX	REALISASI TAHUN XXXX	REALISASI TAHUN XXXX	REALISASI TAHUN XXXX		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4 +s.d 9	11
		JUMLAH								

PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG

Banda Aceh, 26 Mei 2025

KHEDRI, S.Ag. MA.
NIP. 19770611 200212 1 003

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAFTAR KEGIATAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/KODE KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	2	4
	NIHIL		

Banda Aceh, 26 Mei 2025

A PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG *f*


KHEDRI, S.Ag. MA.
NIP. 19770611 200212 1 003

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN KEGIATAN DEBT SWAP RDI-352/1999 YANG DIALOKASIKAN MELALUI APBA 2024

SKPA : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NO	DINAS	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH		SISA ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
			ANGGARAN DPA-SKPA	REALISASI			
			NIHIL				

(Dalam Rupiah)

Catatan :

*) Diisi oleh SKPA yang Mempunyai Kegiatan Debt Swap dan isi NIHIL bagi SKPA yang tidak Mempunyai Kegiatan Debt Swap

Banda Aceh, 26 Mei 2025

PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

KHODRI, S.Ag. MA.

NIP. 19770611 200212 1 003